

**PERAN SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN  
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

**AFRIAN SATRIYO BAYU PAMUNGKAS  
NIM. 135080407113005**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**



**PERAN SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN  
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI  
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

**AFRIAN Satriyo Bayu Pamungkas  
NIM. 135080407113005**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**



SKRIPSI

PERAN SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR

Oleh :

AFRIAN SATRIYO BAYU PAMUNGKAS  
NIM. 135080407113005

Telah dipertahankan didepan penguji  
pada tanggal \_\_\_\_\_  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)

(Mochammad. Fattah, S.Pi, M.Si)

NIP. 19640228 198903 2 011

NIK. 20150686 051310 1 001

Tanggal : 20 DEC 2019

Tanggal : 20 DEC 2019



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)

NIP. 19591205 198503 1 003

Tanggal : 20 DEC 2019

**IDENTITAS TIM PENGUJI**

Judul : **PERAN SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Afrian Satriyo Bayu Pamungkas

NIM : 135080407113005

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

**PENGUJI PEMBIMBING**

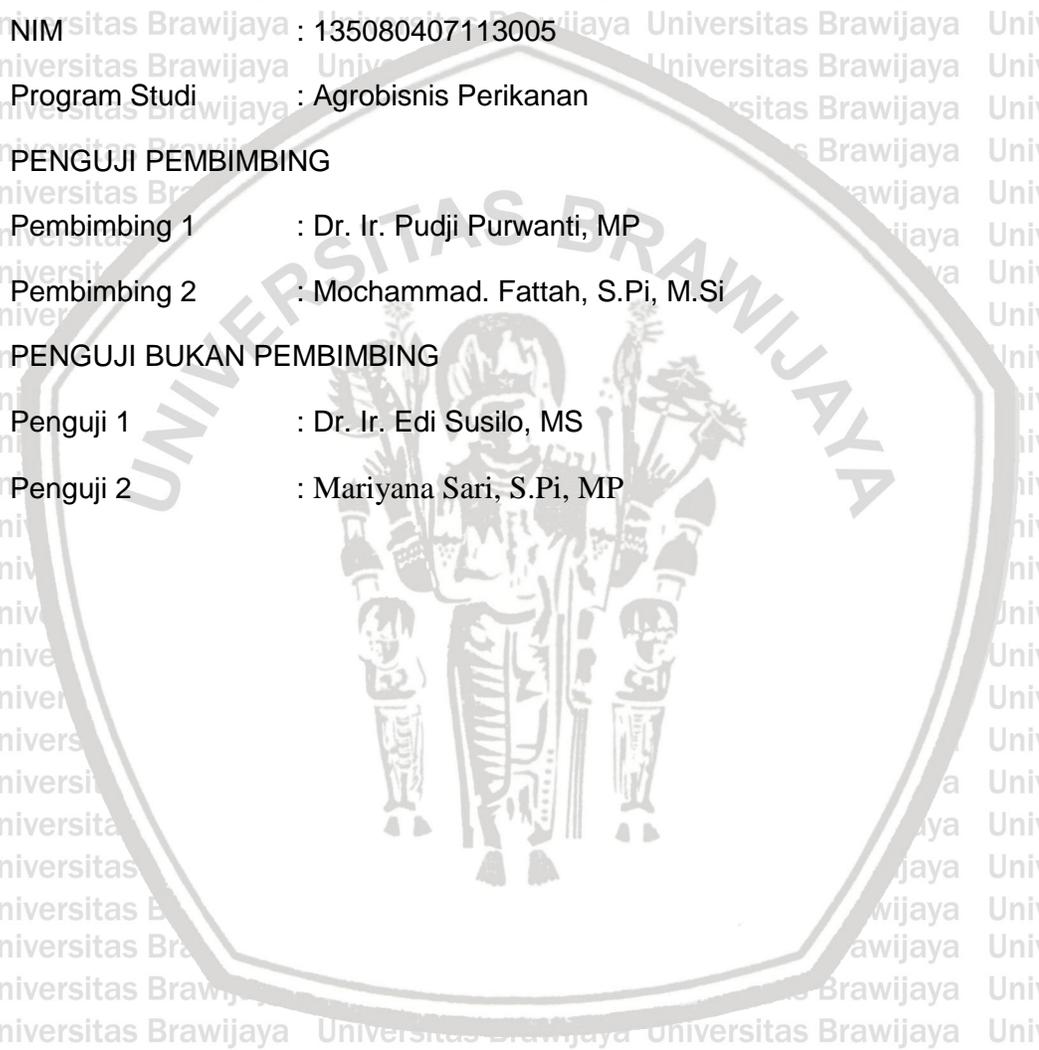
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP

Pembimbing 2 : Mochammad. Fattah, S.Pi, M.Si

**PENGUJI BUKAN PEMBIMBING**

Penguji 1 : Dr. Ir. Edi Susilo, MS

Penguji 2 : Mariyana Sari, S.Pi, MP



## UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat keterlibatan berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, materi atau fasilitas pendukung lainnya. Maka pada kesempatan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmad dan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang ditentukan.
2. Kedua Orang Tua yang telah mendoakan serta mensupport apapun keadaan sehingga bisa terselesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Ir. Pudji Purwanti MP selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan pengarahan serta informasi, meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sejak penyusunan usulan penelitian hingga penyusunan laporan dan laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Mochammad Fattah, S.Pi. M.Si selaku dosen pembimbing dua yang telah banyak memberikan pengarahan serta informasi, meluangkan waktunya dengan sangat sabar telah mengajarkan dan memberikan bimbingan sejak penyusunan usulan penelitian hingga penyusunan laporan dan laporan ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh teman-teman Agrobisnis Perikanan 2013 dan tidak pernah saya lupakan juga sahabat saya Alm. Rangga Aditya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
6. Tidak lupa saya sampaikan terimakasih kepada calon istri "Yunita Adelia" yang telah banyak membantu dan selalu mensupport saya dalam mengerjakan laporan ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, Oktober 2019

Afriani Satriyo Bayu P

## RINGKASAN

**AFRIAN SATRIYO BAYU. P**, Peran Subsektor Perikanan Budidaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP dan Mochammad Fattah, S.Pi, M.Si**).

Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengetahui kemajuan ekonomi suatu daerah. PDRB dibagi dalam beberapa sektor yang saling mempengaruhi terhadap sektor lainnya bahkan mempengaruhi secara keseluruhan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor dalam produk domestik regional bruto (PDRB), maka perlu diadakannya kajian mengenai peran sektor tersebut terhadap nilai PDRB sebagai acuan dalam membuat kebijakan ataupun program mengenai sektor ini terutama pada sektor perikanan dan perikanan budidaya.

Tujuan dari penelitian ini ada lima antara lain mengetahui peran subsektor perikanan budidaya dalam kategori basis ekonomi. Menganalisis produk perikanan budidaya yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo. Menganalisis *multiplier effect* yang dihasilkan oleh subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Ponorogo. Mengetahui kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo. Menganalisis klasifikasi subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Location Quotient* (LQ) yang digunakan untuk mengetahui status sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya dalam kategori basis ekonomi dan digunakan untuk melihat komoditas unggulan. Metode Kontribusi yang digunakan untuk mengetahui kontribusi sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya terhadap PDRB total. Metode *Multiplier effect* digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh perubahan pendapatan yang menjadi faktor pengganda. Metode *Tipologi Klassend* digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya dalam kategori sektor prima, potensial, berkembang, dan terbelakang.

Subsektor perikanan berdasarkan nilai PDRB di Kabupaten Ponorogo bukanlah sektor basis. Hal ini dikarenakan nilai LQ subsektor perikanan dari tahun 2011-2015 mendapatkan nilai LQ kurang dari 1 yakni 0,052, 0,046, 0,043, 0,041, 0,038. Sedangkan subsektor perikanan budidaya juga bukan menjadi subsektor basis dikarenakan subsektor ini memiliki nilai LQ kurang dari 1. Nilai LQ yang di dapat pada tahun 2011 sebesar 0,347, pada tahun 2012 sebesar 0,275, pada tahun 2013 sebesar 0,223, pada tahun 2014 sebesar 0,194, dan pada tahun 2015 sebesar 0,177.

Komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo berjumlah 6 komoditas yang berasal dari perairan darat yaitu ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, ikan

lele, dan ikan mujair. Komoditas yang menjadi unggulan adalah ikan lele dengan nilai tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,2753 sedangkan nilai LQ komoditas terendah yaitu ikan mujair yang mendapat nilai sebesar 0,0001.

Multiplier effect yang dihasilkan berdampak positif dan negatif. Terdapat satu komoditas saja yang berdampak positif dan tertinggi, jenis komoditas yang berdampak positif dengan nilai yang tertinggi yaitu ikan lele dengan nilai 8,8566/Rp 8.566 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan lele akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 8.856,6.

Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDRB total mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 sebesar 0,30%, 2012 sebesar 0,28%, 2013 sebesar 0,25%, 2014 sebesar 0,24%, dan 2015 sebesar 0,17%. Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami penurunan dengan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 0,91%, 2012 sebesar 0,86%, 2013 sebesar 0,80%, 2014 sebesar 0,75%, dan 2015 sebesar 0,52%. Dan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap sektor perikanan cukup besar meskipun mengalami penurunan disetiap tahunnya yakni pada tahun 2011 sebesar 60,93%, 2012 sebesar 52,75%, 2013 sebesar 45,59%, 2014 sebesar 42,50%, dan pada tahun 2015 sebesar 30,29%

Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Ponorogo masuk dalam sektor Potensial. Hal ini dikarenakan kontribusi sektor Perikanan, Kehutanan, dan Perikanan diatas rata-rata sebesar 0,328 meskipun laju pertumbuhannya dibawah rata-rata sebesar 0,905. Kontribusi subsektor perikanan terhadap total PDRB mendapatkan rata-rata sebesar 0,53% selama lima tahun terakhir dan perikanan budidaya terhadap PDRB mendapatkan rata-rata sebesar 0,25% selama lima tahun terakhir.

Sarana dan prasarana pada sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo harus bisa di kembangkan lagi guna meningkatkan hasil produksi budidaya, serta peningkatan kualitas pembudidaya ikan melalui penyuluhan, pelatihan, serta bantuan material. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total PDRB agar terus meningkat dengan memperhatikan nilai yang dihasilkan disetiap komoditas hasil budidaya terutama pada sistem pemasaran yang ada di pasar. Perlu diadakannya penelitian lanjutan mengenai strategi pengembangan teknologi budidaya agar dapat memanfaatkan sumber daya air yang ada secara optimal dan memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan wilayah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, peran subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori nonbasis. Ada 6 komoditas perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo yaitu ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, dan ikan mujair. Tidak ada komoditas yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo di karenakan nilai LQ  $< 1$  yang artinya masih belum nonbasis. *Multiplier effect* komoditas ikan di Kabupaten Ponorogo yang nilainya positif yaitu ikan nila, ikan gurami, dan ikan lele. Jadi hanya komoditas tersebut yang mampu menunjang pendapatan sektor perikanan. Kontribusi perikanan budidaya terhadap pendapatan

daerah regional bruto (PDRB) di Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata sebesar 0,25%. Klasifikasi perikanan di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sektor berkembang.

Saran-saran sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan ekonomi, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pengusaha

- a. Saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memajukan dan mengembangkan sektor perikanan terutama pada subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo antara lain dengan memaksimalkan kinerja para pembudidaya dalam memproduksi komoditas-komoditas ikan dan proses pemeliharaan yang benar sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo.
- b. Perlu ada peningkatan kontribusi dan pengembangan hasil produksi budidaya agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDRB sehingga pada tahun-tahun berikutnya subsektor perikanan budidaya bisa menjadi sector basis dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah

- a. Sarana dan prasarana pada sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo harus bisa dikembangkan lagi guna meningkatkan hasil produksi budidaya, serta peningkatan kualitas pembudidaya serta produksinya melalui penyuluhan serta bantuan material.
- b. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total PDRB agar terus meningkat dengan memperhatikan nilai yang dihasilkan disetiap komoditas hasil budidaya terutama pada system pemasarannya.
- c. Perlu diadakannya penelitian berlanjut mengenai strategi pengembangan teknologi budidaya agar dapat memanfaatkan sumber daya perairan yang ada secara optimal dan memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan wilayah.

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim.* Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat karunia-Nya yang diberikan sehingga pelaksanaan skripsi ini dengan judul “Peran Subsektor Perikanan Budidaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur” sampai dengan penyusunan laporan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Penulis sangat menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>IDENTITAS TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1</b> Latar Belakang.....	<b>1</b>
<b>1.2</b> Rumusan Masalah.....	<b>4</b>
<b>1.3</b> Tujuan.....	<b>5</b>
<b>1.4</b> Kegunaan.....	<b>5</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	<b>7</b>
<b>2.2</b> Perikanan.....	<b>9</b>
<b>2.3</b> Unit budidaya ikan.....	<b>10</b>
<b>2.3.1</b> Kolam.....	<b>10</b>
<b>2.3.2</b> Bak.....	<b>14</b>
<b>2.4</b> Faktor Produksi Budidaya.....	<b>16</b>
<b>2.4.1</b> Modal.....	<b>16</b>
<b>2.4.2</b> Tenaga Kerja.....	<b>17</b>
<b>2.4.3</b> Pakan.....	<b>17</b>
<b>2.5</b> Hasil Budidaya.....	<b>18</b>
<b>2.6</b> Ekonomi Wilayah.....	<b>24</b>
<b>2.7</b> Ekonomi Pembangunan.....	<b>25</b>
<b>2.8</b> Produk Domestik Regional Bruto.....	<b>25</b>
<b>2.8.1</b> Peran dan Dampak Pendapatan Daerah Regional Bruto.....	<b>28</b>
<b>2.9</b> Konsep Basis Ekonomi.....	<b>30</b>
<b>2.10</b> Faktor Pengganda.....	<b>31</b>
<b>2.10.1</b> Faktor Pengganda Pendapatan Wilayah.....	<b>31</b>
<b>2.11</b> <i>Location Qontient (LQ)</i> .....	<b>33</b>
<b>2.12</b> Kontribusi.....	<b>34</b>
<b>2.13</b> <i>Typologi Klassen</i> .....	<b>34</b>
<b>2.14</b> Kerangka Berfikir.....	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
<b>3.1</b> Waktu dan Tempat Penelitian.....	<b>38</b>
<b>3.2</b> Metode Penelitian.....	<b>38</b>
<b>3.3</b> Batasan Masalah.....	<b>38</b>
<b>3.4</b> Jenis dan Sumber Data.....	<b>39</b>
<b>3.4.1</b> Jenis Data.....	<b>39</b>
<b>3.4.2</b> Sumber Data.....	<b>39</b>

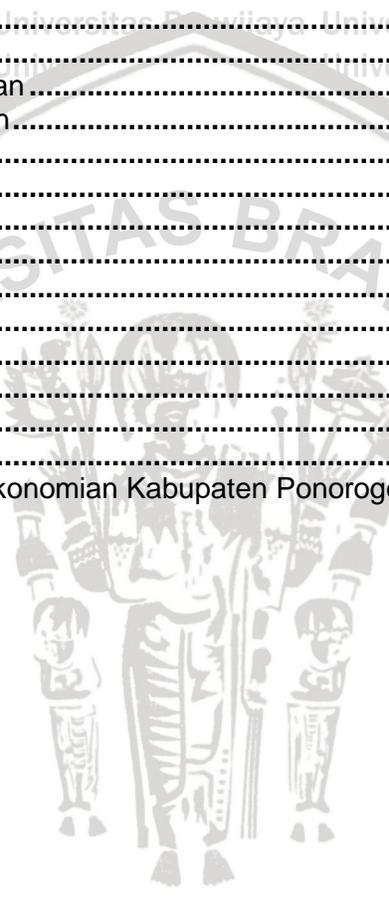
3.5	Teknik Pengambilan Data.....	39
3.6	Teknik Analisis Data .....	41
3.6.1	Kontribusi perikanan budidaya terhadap PDRB di Kab. Ponorogo .....	41
3.6.2	Posisi subsektor perikanan budidaya dalam kategori basis ekonomi..	42
3.6.3	Produk perikanan budidaya yang menjadi unggulan .....	42
3.6.4	Perhitungan dengan <i>Multiplier Effect</i> yang dihasilkan oleh subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo.....	43
3.6.5	Klasifikasi Sektor Perikanan.....	44
<b>KEADAAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
4.1	Kondisi Geografis Dan Topografi Kabupaten Ponorogo .....	46
4.2	Kondisi Demografi Dan Pendidikan Kabupaten Ponorogo .....	47
4.3	Keadaan Umum Perikanan.....	49
4.3.1	Jumlah dan Pemilik Kolam di Kabupaten Ponorogo .....	50
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>51</b>
5.1	Kondisi Perekonomian Kabupaten Ponorogo .....	51
5.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	51
5.1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita .....	53
5.2	Keadaan Umum Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo.....	53
5.2.1	Peran Sektor Perikanan PDRB Kabupaten Ponorogo .....	54
5.2.2	Peran Subsektor Perikanan Budidaya PDRB Kab. Ponorogo.....	55
5.3	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo .....	57
5.3.1	Komoditas Unggulan Kabupaten Ponorogo.....	57
5.4	<i>Multiplier Effect</i> .....	59
5.4.1	Dampak Komoditas Perikanan Budidaya .....	59
5.5	Kontribusi Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo.....	61
5.6	Klasifikasi Sektoral dan Subsektoral Kabupaten Ponorogo.....	65
5.6.1	Klasifikasi Sektoral Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	69
5.7	Implikasi Hasil Penelitian Peran Subsektor Perikanan Budidaya Terhadap Ekonomi Wilayah di Kab. Ponorogo.....	73
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>76</b>
6.1	Kesimpulan .....	76
6.2	Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Produksi perikanan menurut komoditi dan harga .....	3
2. Pendapatan nominal responden sebelum dan sesudah adanyausahaperikanan budidaya di Desa Cinta Manis Lama.....	7
3. Matriks Tipologi Klassen .....	35
4. Matriks Tipologi Klassen .....	45
5. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin .....	47
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	48
7. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	49
8. Jumlah Kolam dan Jumlah Pemilik Kolam.....	50
9. PDRB Kab. Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Berdasar HargaKonstan (Juta Rupiah) Tahun 2011 - 2015 .....	52
10. PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015.....	53
11. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo.....	54
12. Nilai LQ sektor perikanan berdasarkan PDRB menurut harga berlaku tahun 2011 – 2015 (miliar rupiah) .....	55
13. Nilai LQ Subsektor Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo 2011 – 2015 .....	56
14. Volume Produksi Subsektor Perikanan Budidaya di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015.....	57
15. Nilai LQ Komoditas Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo 2011 – 2015.....	58
16. Analisis <i>Multiplier Effect</i> Komoditas Perikanan Budidaya Kab Ponorogo Th. 2012 dan 2013.....	59
17. Analisis <i>Multiplier Effect</i> Komoditas Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo Th. 2014 dan 2015.....	60
18. PDRB Kab. Ponorogo Dan PDRB Sektor Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2011 – 2015.....	63
19. Kontribusi Sektor Perikanan dan Subsektor Perikanan Budidadaaya Kab. Ponorogo Tahun 2011 – 2015.....	63
20. Klasifikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015.....	65
21. Matriks Klasifikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo .....	67
22. Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015.....	70
23. Matriks Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo .....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kolam tanah.....	11
2. Kolam semi intensif.....	11
3. Kolam intensif.....	12
4. Kolam pemijahan.....	12
5. Kolam penetasan.....	13
6. Kolam pemeliharaan.....	13
7. Kolam pemberokan.....	14
8. Bak Beton.....	14
9. Bak Fiber.....	15
10. Bak Plastik.....	15
11. Ikan lele.....	19
12. Ikan gurami.....	20
13. Ikan nila.....	21
14. Ikan Patin.....	22
15. Ikan Mas.....	23
16. Ikan Mujair.....	24
17. Kerangka Berfikir.....	37
18. Grafik sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lokasi Kabupaten Ponorogo.....	82
2. PDRB Kab. Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah) .....	83
3. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011 – 2015 (Ton) .....	81
4. Pendapatan PDRB Sektor Berdasar Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 ...	82
5. Pendapatan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Ponorogo, 2011 – 2015 .....	83
6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.....	84



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas perairan hampir dua pertiga dari luas wilayahnya yaitu sekitar 70%. Wilayah perairan di Indonesia berdasar kandungan kadar garamnya atau salinitas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis perairan yaitu perairan tawar, perairan payau dan perairan laut. Dari tiga jenis perairan tersebut dapat dihasilkan suatu produksi perikanan yang memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Potensi perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 15.590.000 hektar yang terdiri dari potensi air tawar 2.230.000 ha, air payau 1.220.000ha dan budidaya laut sebesar 12.140.000ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,1% untuk budidaya ikan air tawar, 40% untuk budidaya ikan air payau dan 0,01% untuk budidaya laut, sehingga secara nasional produksi perikanan budidaya baru mencapai 1.480.000ton (Gusrina, 2008).

Perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi kritis, dari krisis moneter yang dimulai pada pertengahan Juli 1997, hal tersebut seakan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat melihat kondisi fundamental perekonomian nasional. Di sisi lain kondisi ini seharusnya dapat memotivasi semua pihak agar sesegera mungkin mengatur langkah-langkah konkrit guna merekonstruksi keadaan perekonomian yang dilanda masalah tersebut. Salah satu hal yang relevan dalam hal ini adalah dengan mengelola dan memberdayakan sektor-sektor andalan secara efektif guna memperoleh hasil yang optimal.

Secara ekonomis, upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Disamping kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, kemampuan menciptakan lapangan kerja relative kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan.

Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), tapi pada kenyataannya, selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memperlihatkan bahwa sektor industri selama ini diharapkan menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak mampu bertahan. Sementara untuk sektor pertanian yang kurang diperhatikan (diindikasikan dengan penurunan alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian) terbukti mampu menjadi katup pengaman dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian terbukti bahwa sektor pertanian mampu menghadapi gejolak ekonomi dan dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat berfungsi sebagai stabilisator dan katup pengaman perekonomian.

Menurut Cahyono (2005), peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional antara lain meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan lapangan kerja baru dan meningkatkan kebutuhan konsumsi ikan untuk memenuhi gizi masyarakat.

Pada tahun 2006 sektor pertanian (dalam arti luas) mampu menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 44,5% (42.300.000 orang tenaga kerja) dari total 95.100.000 orang tenaga kerja nasional yang terserap pada berbagai bidang pekerjaan. Subsektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,4% atau sebanyak 6.100.000 orang tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2007). Produksi

perikanan nasional setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2001-2005 dengan laju kenaikan per tahun 6,57%.

Produksi perikanan darat yang utama di Kabupaten Ponorogo adalah budidaya ikan di kolam 98,62% sementara penangkapan/budidaya ikan di perairan umum hanya mencakup 1,38% saja. Jenis ikan di kolam budidaya yang banyak diusahakan adalah gurami, lele, ikan mas, patin dan nila. Namun yang produksinya paling besar adalah ikan lele dengan jumlah produksi di tahun 2015 mencapai 1.369 ton. Jumlah ini menurun 26,39% dibanding tahun 2014. Sebaliknya produksi ikan nila dan gurami lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2015).

Produksi perikanan darat menurut komoditi dan harga di kabupaten ponorogo pada tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Produksi perikanan menurut komoditi dan harga**

No	Komoditi	Produksi (ton)		Harga (Rp/Kg)	
		2014	2015	2014	2015
1	Nilam/Ngongok	5,64	6,56	18000	18000
2	Baung Putih/Garingan	6,76	4,56	17000	18000
3	Tempeh	-	-	-	-
4	Udang	8,11	6,11	18000	22000
5	Katak	7,44	5,64	22000	26000
6	Lele	1860	1369,08	16000	15000
7	Nila	96,30	106,94	25000	20000
8	Gurami	108	158,70	30000	30000

Subsektor perikanan budidaya salah satu subsektor yg mendukung dan berkembang yang memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan juga merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan pada posisi strategis serta kontribusi Kabupaten Ponorogo melalui subsektor perikanan, khususnya pada volume

produksi perikanan darat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan lokasi Kabupaten Ponorogo yang jauh dari lokasi central perikanan, tetapi dengan budidaya air daratnya bisa mengembangkan produksinya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul dan membahas skripsi “Peran Subsektor Perikanan Budidaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi terhadap PDRB. Data PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015 menunjukkan subsektor perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi. Hal ini menunjukkan suatu yang positif dan terus di jaga dengan menentukan strategi atau dengan mengembangkan komoditas unggulan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo, serta mencari besar potensi perikanan budidaya dalam kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo dalam kategori basis ekonomi dari segi pendapatan wilayah.

1. Apakah peran subsektor perikanan budidaya dalam kategori basis ekonomi.
2. Produk perikanan budidaya apa saja yang menjadi komoditas unggulan.
3. Bagaimana *multiplier effect* yang dihasilkan oleh subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo.
4. Bagaimana kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo.
5. Bagaimana klasifikasi perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo.

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo, termasuk dalam kategori basis atau non basis.
2. Menganalisis produk perikanan budidaya yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo
3. Mengalisis *multiplier effect* yang dihasilkan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo
4. Menganalisis kontribusi perikanan budidaya terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Ponorogo
5. Menganalisis klasifikasi subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo

### 1.4 Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan bagi pengusaha untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo.

#### 2. Bagi Pemerintah

Sebagai sumber pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dapat juga digunakan untuk membuat program yang berguna bagi masyarakat.

3. Bagi akademisi

Bagi akademisi penelitian ini sebagai sumber, acuan, serta referensi untuk penelitian diwaktu mendatang. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kegiatan sosial masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bisa menjadi acuan masyarakat untuk mengembangkan produksi perikanan budidaya di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ponorogo pada khususnya.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama dilakukan di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang memiliki potensi yang sangat besar guna pengembangan sektor perikanan budidaya air tawar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kecamatan Banyuasin I dipengaruhi oleh pasang surut air sungai, sehingga ketersediaan air untuk menunjang proses budidaya tidak menjadi kendala. Data yang terkumpul dari hasil kuisisioner dinyatakan dalam bentuk tabel, berupa data karakteristik responden yang meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan utama dan dampak usaha perikanan budidaya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Cinta Manis Lama. Tingkat pendapatan responden sebelum ada dan setelah adanya usaha perikanan budidaya sangat bervariasi. Pendapatan nominal responden sebelum dan sesudah adanya usaha perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Pendapatan nominal responden sebelum dan sesudah adanya usaha perikanan budidaya di Desa Cinta Manis Lama.**

Uraian	Responden	Pendapatan Rata-Rata (Rp)		Kenaikan	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
Pembudidaya Ikan	20				
	6	350.000	1.100.000	750.000	214,28%
	4	200.000	700.000	500.000	250%
	5	250.000	750.000	500.000	200%
	5	300.000	600.000	300.000	100%
Pembudidaya (Usaha Sampingan)	20				
	7	400.000	550.000	150.000	37,50%
	5	350.000	550.000	200.000	57,14%
	2	900.000	1.100.000	200.000	22,22%
	3	300.000	450.000	150.000	50%
3	550.000	700.000	150.000	27,27%	

Ditinjau dari segi presentase penambahan pendapatan, maka responden pembudidaya seluruhnya mengalami peningkatan pendapatan. Laju peningkatan tertinggi, yaitu 250%. Responden yang menjadikan usaha perikanan budidaya sebagai sampingan juga mengalami laju peningkatan pendapatan sebesar 22,22% - 57,14% (Tike, 2014).

Penelitian kedua dilakukan di Kota Sibolga, selama tahun 2007 – 2011, produksi rata-rata perikanan tangkap mencapai 12,67% dari rata-rata produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dengan pendapatan PDRB sebesar 23,07% dari total PDRB Kota Sibolga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan subsektor perikanan tangkap terhadap pembangunan daerah dan mengidentifikasi jenis komoditas hasil tangkapan unggulan di Kota Sibolga. Jenis penelitian adalah studi kasus yang dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis *shift share*, *multiplier effect* dan *location quotient* (LQ). Hasil analisis *shift share* menunjukkan kontribusi perikanan tangkap Kota Sibolga pada tahun 2011 terhadap sector pertanian sebesar 97,91% dan total PDRB sebesar 22,85%. Perhitungan nilai LQ berdasar indikator PDRB dan tenaga kerja menunjukkan subsektor perikanan tangkap merupakan sector basis di Kota Sibolga dengan nilai LQ lebih dari 1. Hasil *multiplier effect* berdasar indikator PDRB dan tenaga kerja rata-rata sebesar 4,22 satuan dan 4,90 satuan (Haslan F, 2016).

Kabupaten Jepara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah dimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana indikator tersebut pada dasarnya menghitung total nilai tambah faktor produksi suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

posisi sektor pertanian, sektor perekonomian lainnya dan subsektor pertanian yang menjadi basis dan tidak basis di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *location quotient* (LQ) dan metode Kontribusi. Metode analisis data yang digunakan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat sektor pertanian dan perekonomian lainnya serta tiga subsektor pertanian dan perekonomian lainnya serta tiga subsektor pertanian basis di Kabupaten Jepara. Berdasarkan analisis *shift share* terdapat enam sektor perekonomian lainnya yang memiliki pertumbuhan yang cepat pada tahun 2007 – 2011 sedangkan subsektor pertanian di Kabupaten Jepara terdapat dua subsektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat (Kusumawati, 2012).

## 2.2 Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (4) tersebut tercantum bahwa ikan sendiri adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (keristina, 2011).

Wilayah perairan di Indonesia berdasarkan kandungan kadar garamnya atau salinitas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis perairan yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Dari ketiga jenis perairan tersebut dapat dihasilkan suatu produksi perikanan yang memberikan nilai tambah bagi

pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 15.590.000ha yang terdiri dari potensi air tawar 2.230.000 ha, air payau 1.220.000 ha, dan budidaya air laut 12.140.000ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru mencapai 10,1% untuk budidaya ikan air tawar, 40% untuk budidaya air payau, dan pada budidaya air laun hanya 0,01%, sehingga secara nasional produksi perikanan budidaya mencapai 1.480.000 ton.

Freddy Numberi (2006) berpendapat bahwa akan menargetkan produksi perikanan pada tahun 2006 mencapai 7.700.000ton atau meningkat sebesar 13%, terdiri dari produksi perikanan tangkap 5.100.000 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 2.600.000 ton, dan konsumsi ikan menjadi 28 kg/kapita/tahun.

### **2.3 Unit budidaya ikan**

Ikan sebagai salah satu jenis organisme yang hidup pada suatu perairan, jika manusia melakukan kegiatan budidaya yaitu memproduksi organisme tersebut dalam suatu lingkungan perairan yang terbatas dan terkontrol dengan baik, maka manusia harus memahami tentang lingkungan perairan dimana ikan tersebut dapat tumbuh dan berkembang seperti di habitat aslinya. Lingkungan perairan tempat ikan yang dibudidayakan tumbuh dan berkembang disebut dengan media(Gusrina, 2008).

#### **2.3.1 Kolam**

Sebagian besar budidaya ikan dilakukan di kolam. Kolam adalah tubuh air yang dibangun dengan membentuk pematang atau dengan menggali tanah sehingga nantinya dapat menampung air. Pertimbangan pemilihan lahan untuk kolam meliputi

: topografi, jenis tanah, ketersediaan air secara kuantitatif dan kualitatif, serta aksesibilitas (Dahuri, 2004).

Jenis-jenis kolam yang akan digunakan tergantung kepada sistem budidaya yang akan diterapkan ada tiga system budidaya ikan yang biasa dilakukan yaitu :

a. Tradisional/ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam tanah yaitu kolam yang keseluruhannya terbuat dari tanah.



**Gambar 1. Kolam tanah**

b. Semi intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian kolam (dinding pematang) terbuat dari tembok sedangkan dasar kolam terbuat dari tanah.



**Gambar 2. Kolam semi intensif**

c. Intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang keseluruhan bagiannya menggunakan beton cor dan dindingnya sudah bertembok.



**Gambar 3. Kolam intensif**

Jenis-jenis kolam yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kolam antara lain kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam pembesaran, dan kolam pemberokan.

- a. Kolam pemijahan, kolam pemijahan adalah kolam yang dibuat sebagai tempat perkawinan induk jantan dan betina yang di budidaya. Kolam pemijahan sebaiknya dibuat dengan sistem pengairan yang baik yaitu mudah dikeringkan dan pada lokasi yang mempunyai air mengalir yang bersih.



**Gambar 4. Kolam pemijahan**

- b. Kolam penetasan, kolam penetasan adalah kolam yang dibuat untuk menetasakan telur ikan, dasar kolam penetasan terbuat dari semen atau tanah yang keras agar tidak ada lumpur yang mengotori telur yang akan merusak dan memperburuk keadaan telur. Ukuran kolam penetasan biasanya 3x2 m atau 4x3 m, untuk memudahkan perawatan dan pemeliharaan larva.



**Gambar 5. Kolam penetasan**

c. Kolam pemeliharaan benih, kolam pemeliharaan benih adalah kolam yang digunakan untuk memelihara benih sampai ukuran siap jual. Kolam pemeliharaan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Pada kolam semi intensif atau tradisional sebaiknya tanah dasar kolam menggunakan tanah yang subur jika di pupuk dapat tumbuh pakan alami yang dibutuhkan untuk benih ikan.



**Gambar 6. Kolam pemeliharaan**

d. Kolam pemberokan, kolam pemberokan adalah kolam yang digunakan untuk menyimpan induk-induk ikan yang akan dipijahkan atau yang akan dijual/angkut ke tempat yang jauh.



**Gambar 7. Kolam pemberokan**

### **2.3.2. Bak**

Berdasarkan proses budidaya ikan, jenis bak yang akan digunakan disesuaikan dengan skala produksi budidaya dan hampir sama dengan kolam dimana dapat dikelompokkan menjadi bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan dan bak pemberokan. Bak yang digunakan untuk melakukan pemijahan ikan biasanya dari bak beton, bak fiber, bak plastik. Bak plastik biasanya digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva (Gusrina, 2008).

#### **a. Bak Beton**

Bak beton adalah bak yang terbuat dari cor-coran semen, bak tersebut dibangun dengan permanen. Bak beton relatif aman dari berbagai hama dan resiko rusak atau kebocoran. Selain dari segi estetika, bak beton juga lebih rapi dan enak untuk dipandang.



**Gambar 8. Bak Beton**

b. Bak Fiber

Bak fiber adalah bak yang terbuat dari bahan fiberglass. Bak ini memiliki kelebihan dibandingkan bak plastik atau terpal yaitu berat total yang tidak begitu berat sehingga mudah dipindahkan kemanapun serta memiliki ketahanan yang tinggi terhadap panas matahari sehingga tidak mudah retak dan pecah.



Gambar 9. Bak Fiber

c. Bak Plastik

Bak plastik adalah bak yang terbuat dari bahan terpal yang di tegakkan dengan rangka-rangka yang dibuat dari bambu atau kerangka besi. Bak ini banyak digunakan karena biaya pembuatannya yang murah dan efisien. Akan tetapi bak plastik ini memiliki kekurangan daripada bak fiber, karena kolam ini akan mudah mengalami kebocoran



Gambar 10. Bak Plastik

## 2.4 Faktor Produksi Budidaya

Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan optimalisasi dari faktor-faktor produksi seperti, tenaga kerja dan modal oleh perusahaan agar menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Dalam pengertian ekonomi, produksi diartikan sebagai usaha untuk menciptakan atau menambah daya dan nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sukirno, 2011).

Soekartawi (2002), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting. Hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) disebut dengan fungsi produksi.

### 2.4.1 Modal

Modal adalah seperangkat sarana yang digunakan para pekerja baik berupa barang maupun uang guna menjalankan usahanya. Modal tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Modal investasi : Berupa tanah, bangunan, peralatan produksi, dan lain-lain.
2. Modal kerja : Berupa bahan baku, bahan penunjang, teknologi, dan lain-lain.

Modal merupakan masalah sentral yang dihadapi oleh pengusaha. Dalam situasi ini modal memegang peranan penting dalam perekonomian. Penggunaan modal yang besar dalam proses produksi akan dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh pengusaha. Tanpa adanya modal maka tidak mungkin suatu proses produksi dapat berjalan (Sadono Sukirno, 2004).

### 2.4.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan pada usaha produksi. Setiap usahapertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunaan tenaga kerjadinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan menentukan macam-macam tenaga kerja yang bagaimana diperlukan (Soekartawi, 2002).

### 2.4.3 Pakan

Pakan ikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu usaha budidaya perikanan. Ketersediaan pakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Dalam proses budidaya ikan khususnya pada kegiatan pembesaran, faktor terpenting adalah ketersediaan pakan dalam jumlah yang cukup. Pakan memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 60-70% dari total biaya produksi dan pakan tersebut harus mengandung seluruh nutrisi yang diperlukan seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin serta *asam amino esensial* dalam jumlah cukup dan seimbang (Kordi, 2009).

Tepung ikan merupakan salah satu komponen penting di dalam formulasi pakan, karena tepung ikan merupakan sumber protein hewani yang terdapat dalam pakan ikan. Mudjiman (2004) berpendapat bahwa, sampai saat ini tepung ikan memiliki kedudukan yang penting dan masih sulit digantikan oleh bahan baku lain, hal ini dikarenakan tepung ikan memiliki kandungan *Essensial Amino Acid (EAA)* dan asam lemak esensial dari kelompok *omega-3 Higher Unsaturated Fatty Acid (HUFA)*. Di dalam industri pakan ikan pemenuhan tepung ikan masih tergantung

pada produk impor, karena produk di dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan pabrik pakan. Permintaan petani ikan terhadap tepung ikan semakin meningkat, sedangkan pasokan tepung ikan mengalami penurunan sehingga menyebabkan harga tepung ikan semakin mahal.

## 2.5 Hasil Budidaya

Produksi perikanan darat yang utama di Kabupaten Ponorogo adalah budidaya ikan di kolam (98,62%) sementara penangkapan/budidaya ikan di perairan umum hanya mencakup 1,38% saja. Jenis ikan di kolam budidaya yang banyak diusahakan adalah gurami, lele, dan nila. Namun produksi tertinggi adalah ikan lele dengan jumlah produksi di tahun 2015 mencapai 1.369 ton (Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2016).

### a. Ikan Lele

#### • Klasifikasi

Klasifikasi ikan lele menurut Saanin (1984) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia  
Filum : Chordata  
Subfilum : Vertebrata  
Kelas : Pisces  
Subkelas : Teleostei  
Ordo : Ostariophysii  
Famili : Clariidae  
Genus : Clarias  
Spesies : *Clarias sp*

Bentuk tubuh ikan lele memanjang, agak silindris (membulat) dibagian depan dan mengecil ke bagian ekornya. Kulitnya tidak memiliki sisik, berlendir dan licin.

Jika terkena sinar matahari, warna tubuh ikan lele menjadi pucat dan jika terkejut warna tubuhnya otomatis menjadi loreng seperti mozaik hitam putih (Khairuman dan Khairul, 2002).



**Gambar 11. Ikan lele**

#### **b. Ikan Gurami**

##### **• Klasifikasi**

Bleeker (1802) dalam Yusuf Bachtiar (2010), berpendapat bahwa klasifikasi gurami sebagai berikut :

Filum : Cordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Pisces

Subkelas : Teleostei

Ordo : Labyrinthici

Subordo : Anabantoidae

Genus : *Osphronemus*

Spesies : *Osphronemus guramy Lac*

Ikan gurami termasuk golongan labyrinthici, yaitu ikan yang memiliki alat pernafasan tambahan yaitu berupa selaput tambahan berbentuk tonjolan pada tepi atas lapisan insang yang pertama yang biasa di sebut labyrinth. Gurami memiliki bentuk yang agak panjang, pipih dan tertutup sisik yang berukuran besar serta terlihat kasar dan kuat (Romero, 2002).



Gambar 12. Ikan gurami

### c. Ikan Nila

#### • Klasifikasi

Klasifikasi ikan nila menurut Amri (2007) dijelaskan sebagai berikut :

Filum	: Chordata
Subfilum	: Vertebrata
Kelas	: Pisces
Subkelas	: Acanthopterigii
Ordo	: Cichlidae
Genus	: Oreochromis
Spesies	: <i>Oreochromis sp</i>

Ciri-ciri ikan nila mempunyai bentuk tubuh yang bulat pipih, punggung lebih tinggi, pada badan dan sirip ekor (caudal fin) ditemukan garis lurus (vertikal). Pada

sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Ikan nila dapat hidup di perairan tawar dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya (Saain, 1968).



Gambar 13. Ikan nila

#### d. Ikan Patin

- **Klasifikasi**

Adapun klasifikasi menurut Saain (1984), adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Famili	: Pangasidae
Genus	: <i>Pangasius</i>
Spesies	: <i>Pangasius pangasius</i>

Ikan patin memiliki tubuh memanjang yang berwarna putih keperak-perakan dengan punggung berwarna kebiru-biruan. Ikan ini memiliki kepala yang relatif kecil, mulut terletak di ujung kepala bagian bawah, pada kedua sudut mulutnya terdapat dua pasang kumis yang berfungsi sebagai alat peraba yang merupakan ciri khas golongan *catfish*, dan memiliki sirip ekor dengan bentuk cagak dan simetris (Djariah, 2001).



Gambar 14. Ikan Patin

### e. Ikan Mas

- **Klasifikasi**

Khairuman (2008) berpendapat, bahwa klasifikasi ikan mas adalah sebagai berikut :

Filum	: Chordata
Kelas	: Pisces
Ordo	: Cyprinoformes
Famili	: Cyprinidae
Genus	: <i>Cyprinus</i>
Spesies	: <i>Cyprinus carpio</i>

Bagian tubuh ikan mas ditutupi dengan sisik yang besar, yang berjenis *cycloid*

yaitu sisik halus yang berbentuk lingkaran. Ikan mas memiliki lima buah sirip, yaitu

sirip punggung (*dorsal fin*), sirip dada yang terletak di belakang tutup insang

(*pectoral fin*), sirip perut (*pelvic fin*), sirip dubur yang berada di belakang dubur (*anal*

*fin*), dan sirip ekor yang berada di belakan tubuh dengan bentuk cagak (*caudal fin*)

(Santoso, 2011).



Gambar 15. Ikan Mas

#### f. Ikan Mujair

##### • Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Perciformes
Famili	: Cichlidae
Genus	: <i>Oreochromis</i>
Spesies	: <i>Oreochromis mossambicus</i>

Ikan mujair memiliki kecepatan pertumbuhan yang relatif cepat, tetapi setelah ikan mujair dewasa kecepatan pertumbuhannya akan mulai melambat. Populasi ikan mujair dapat meningkat sangat pesat dalam waktu beberapa bulan saja, dimana ikan mujair ini mudah beradaptasi dengan aneka lingkungan perairan dan kondisi ketersediaan makanan (Sugiarto, 1988).



Gambar 16. Ikan Mujair

## 2.6 Ekonomi Wilayah

Ekonomi wilayah atau disebut dengan ekonomi regional muncul sebagai suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi yang secara resmi baru mulai pada pertengahan tahun lima puluhan. Karena ada kekhususan yang dimiliki oleh ekonomi regional menyebabkan ilmu ini telah berkembang menjadi suatu bidang spesialisasi yang baru yang berdiri sama halnya dengan cabang ilmu ekonomi lainnya seperti ekonometrik, ekonomi kependudukan, *operational research*, dan lain-lainnya. Ilmu ekonomi regional muncul sebagai suatu kritik dan sekaligus memberi dimensi baru pada analisis ekonomi dalam rangka melengkapi dan mengembangkan pemikiran ekonomi tradisional sehingga dapat memecahkan masalah-masalah social ekonomi yang terus berubah sepanjang zaman.

Ruang (region) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu: (1) jarak; (2) lokasi; (3) bentuk; dan (4) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaan membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara bersamaan menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (Emilia, 2006).

## 2.7 Ekonomi Pembangunan

Meier dan Baldwin (1957) berpendapat bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapat per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang atau laju pembangunan lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita riil meningkat.

Pada hakikatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasi sifat-sifat ini kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut (Siahaan, 2001)

Menurut Todaro (1997), ilmu ekonomi pembangunan berkaitan dengan keseluruhan proses politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi structural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi mewujudkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien bagi sebagian besar penduduk. Disebutkan bahwa keberhasilan transformasi itu merupakan elemen penting dalam keseluruhan proses dan studi pembangunan ekonomi.

## 2.8 Produk Domestik Regional Bruto

Badan Pusat Statistik Ponorogo (2016) berpendapat bahwa, potensi perekonomian suatu wilayah dicerminkan oleh PDRB yang nilainya merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) menggambarkan produksi riil

yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (adhk) menggambarkan pertumbuhan riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi perubahan harga/inflasi.

Widodo (2006) menambahkan bahwa, PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Pengukuran PDRB ini dengan pendekatan produksi, menurut Badan Pusat Statistik yaitu unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa. PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut (Hadi Sasana, 2006).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2016) Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) antara lain :

A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

a) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

1) Tanaman Pangan

2) Tanaman Holtikultura

3) Tanaman Perkebunan

4) Peternakan

5) Jasa Pertanian dan Perburuan

b) Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

c) Subsektor Perikanan

B. Pertambangan dan Penggalian

a) Subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

b) Subsektor Pertambangan Batubara dan Lignit

c) Subsektor Pertambangan Bijih Logam

d) Subsektor Penggalian lainnya

C. Industri Pengolahan

a) Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

b) Subsektor Industri Makanan dan Minuman

c) Subsektor Industri Pengolahan Tembakau

d) Subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

e) Subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

f) Subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Barang

Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya

g) Subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan

Reproduksi Media Rekaman

h) Subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

i) Subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

j) Subsektor Industri Barang Galian bukan Logam

k) Subsektor Industri Logam Dasar

l) Subsektor Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik

dan Peralatan Listrik

m) Subsektor Industri Mesin dan Perlengkapan

- n) Subsektor Industri Alat Angkutan
- o) Subsektor Industri Furnitur
- p) Subsektor Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

#### D. Listrik, Gas dan Air Bersih

- a) Subsektor Listrik
- b) Subsektor Gas dan Produksi Es

#### E. Kontruksi

#### F. Perdagangan, Hotel dan Restoran

#### G. Pengangkutan dan Komunikasi

- a) Angkutan Rel
- b) Angkutan Darat/*Land Transport*
- c) Angkutan Laut
- d) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- e) Angkutan Udara/*Air Transport*

#### H. Keuangan, Real Estate dan Perusahaan

#### I. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

### 2.8.1 Peran dan Dampak Pendapatan Daerah Regional Bruto

Pada skala Nasional PDRB disebut dengan PDB. Peran dalam ekonomi, PDB sebagai indikator kondisi ekonomi suatu Negara dalam periode tertentu serta dibagi dalam dasar harga berlaku maupun harga konstan (BPS, 2016).

Data PDRB biasanya disajikan dalam bentuk statistik dari tahun ke tahun, data yang digunakan adalah data lima tahun terakhir. Peran dari PDRB ini antara lain sebagai berikut :

1. PDB harga berlaku nominal bermanfaat untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu Negara. Nilai PDB yang besar berbanding lurus dengan sumber daya ekonominya.
2. PNB harga berlaku bermanfaat untuk menunjukkan pendapatan.
3. PDB harga konstan (rill) berperan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor berperan menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Jika ada sektor ekonomi yang mempunyai peran besar maka bisa menunjukkan sektor ekonomi yang mempunyai peran besar maka bisa menunjukkan sektor basis perekonomian suatu negara.
5. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan perdagangan dengan pihak luar negeri.
6. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
7. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
8. PDB dan PNB menurut kapasitas atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB individu.
9. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.

## 2.9 Konsep Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2007).

Inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang dan jasa termasuk tenaga kerja. Sektor basis dan sektor non basis mempunyai hubungan dengan permintaan diluar wilayah. Sektor basis berhubungan secara langsung. Sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis dulu. Apabila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Hal ini pada gilirannya akan mengembangkan sektor non basis.

Teori basis ini hanya mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi kedalam dua sektor tersebut. Jadi tenaga kerja sector basis ditambah tenaga kerja sektor non basis sama dengan total tenaga kerja wilayah (Budiharsono, 2001).

Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis disuatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*prime move role*) dimana

setiap perubahan mempunyai *multiplier effect* terhadap perekonomian regional (Budiharsono, 2001).

## 2.10 Faktor Pengganda

Faktor pengganda merupakan efek penggandaan terhadap output yang timbul akibat adanya satu kegiatan ekonomi atau perubahan dalam input ekonomi sektor tertentu. Dampak yang ditimbulkan terhadap seluruh perekonomian wilayah dapat dihitung dengan cara mengalikan peningkatan kegiatan tersebut dengan faktor pengganda (Setiono, 2011).

*Multiplier* dari investasi otonom digambarkan sebagai pengaruh dari investasi awal di dalam produksi, pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Besar kecilnya koefisien *multiplier* tergantung pada kemiringan (*slope*) dari garis pengeluaran agregat yang direncanakan (Sukirno, 2006).

### 2.10.1 Faktor Pengganda Pendapatan Wilayah

*Multiplier* dengan menggunakan indikator pendapatan ini, dilandaskan pada kenyataan bahwa penginjeksian sejumlah uang tertentu ke dalam perekonomian regional akan menaikkan pendapatan regional yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran konsumen (walaupun dalam jumlah yang lebih kecil daripada jumlah uang yang diinjeksikan semula). Bagian pendapatan yang dibelanjakan ini akan menjadi pendapatan bagi pihak lain yang selanjutnya membelanjakan sebagian, dan demikian seterusnya (Glasson, 1977).

Glasson (1977) berpendapat bahwa secara keseluruhan pendapatan wilayah ( $Y$ ) merupakan penjumlahan pendapatan sektor basis ( $Y_b$ ) dan sektor non basis ( $Y_n$ ). Pendapatan sektor basis akan dibelanjakan kembali di dalam wilayah maupun untuk impor. Pendapatan yang dibelanjakan kembali di dalam wilayah untuk

produksi lokal akan menghasilkan efek pengganda terhadap pendapatan wilayah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Jika proporsi pendapatan sektor basis yang dibelanjakan kembali di dalam wilayah sebesar  $r$ , maka total pendapatan sektor basis yang dibelanjakan kembali adalah sebesar  $(r) Y_b$ . Selanjutnya pembelanjaan kembali di dalam wilayah akan menghasilkan total pendapatan sebesar  $(r^2) Y_b$ , kemudian menjadi  $(r^3) Y_b$  dan seterusnya. Adapun rumus yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = Y_b + rY_b + r^2Y_b + r^3Y_b + \dots + rnY_b$$

Rumus diatas disederhanakan menjadi :

$$Y = Y_b + \left[ \frac{1}{1-r} \right]$$

Faktor  $\frac{1}{1-r}$  merupakan ekonomi pengganda yang menimbulkan pengganda terhadap perekonomian keseluruhan. Secara empiris  $r$  sulit ditemukan, maka rumus diturunkan lebih lanjut untuk mencari nilai  $r$  sebagai berikut :

$$r = \frac{Y - Y_b}{Y}$$

Rumus diatas menyatakan bila  $Y - Y_b = Y_n$ , maka diturunkan menjadi :

$$r = \frac{Y_n}{Y}$$

Dengan demikian *economic multiplier* dalam jangka pendek sebagai berikut :

$$MSy = \frac{Y}{Y_b}$$

Dimana :

$MSy$  : Koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator pendapatan

$Y$  : Jumlah total pendapatan wilayah

$Y_b$  : Jumlah pendapatan sektor basis

Perubahan pendapatan wilayah karena adanya peningkatan kegiatan basis dapat diturunkan atau disederhanakan menjadi :

$$\Delta Y = \Delta Yb (MSy)$$

Dimana :

$MSy$  : Koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator pendapatan

$\Delta Y$  : Perubahan pendapatan wilayah

$\Delta Yb$  : Perubahan pendapatan sektor basis

### 2.11 Location Qontient (LQ)

LQ adalah perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah tingkat pendapatandan jumlah lapangan kerja. Apabila LQ kurang dari satu maka wilayah yang bersangkutan harus mengimpor, sedangkan apabila nilai LQ suatu wilayah lebih dari satu maka wilayah tersebut dapat melakukan ekspor (Tarigan, 2007).

Rumus perhitungan dengan metode ini adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan :

$vi$  : Produksi komoditas pada wilayah yang diselidiki

$vt$  : Produksi total komoditas sektoral

$Vi$  : Produksi komoditas total regional

$Vt$  : Produksi total provinsi

Hasil perhitungan dibagi menjadi 3, berikut penjelasannya :

LQ > 1 artinya komoditas memiliki keunggulan yang komperatif menjadi basis dan bisa untuk ekspor atau pengiriman ke luar wilayah

LQ = 1 artinya komoditas memiliki kunggulan yang komperatif dan menjadi sektor non-basis. Komoditas tidak dapat untuk ekspor namun masih bisa memenuhi kebutuhan regional

LQ < 1 artinya komoditas tidak memiliki keunggulan yang komperatif dan menjadi sektor non-basis. Sehingga tidak bisa untuk ekspor bahkan impor dikarenakan kebutuhan regional tidak terpenuhi

## 2.12 Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan subsektor perikanan dan perikanan budidaya terhadap PDRB di daerah tertentu (Azwar, 2005). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$P_n = \frac{PDRB (P_t)}{PDRB (T)} \times 100\%$$

Dimana :

$P_n$  : Nilai kontribusi

$PDRB (P_t)$  : Nilai PDRB perikanan budidaya

$PDRB (T)$  : Total PDRB

## 2.13 Typologi Klassen

Metode yang digunakan dasarnya melihat perubahan nilai dari dua tahun ke tahun berikutnya. Setiap sektor ekonomi dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi yaitu prima, berkembang, potensial, dan terbelakang (Widodo, 2016). Dengan kriteria dibawah ini.

- 1) Sektor Prima :  $R_i \geq R_n$  dan  $K_i \geq K_n$
- 2) Sektor Potensial :  $R_i \geq R_n$  dan  $K_i < K_n$
- 3) Sektor Berkembang :  $R_i < R_n$  dan  $K_i \geq K_n$
- 4) Sektor Terbelakang :  $R_i < R_n$  dan  $K_i < K_n$

Keterangan :

$R_i$  : Pertumbuhan PDRB Kabupaten

$R_n$  : Pertumbuhan PDRB Provinsi

$K_i$  : Kontribusi PDRB Kabupaten

$K_n$  : Kontribusi PDRB Provinsi

Kategori diatas dibagi berdasar laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya serta besar kontribusi sektor terhadap PDRB secara total, berikut tabel 4 gambaran

kategori diatas :

**Tabel 3. Matriks Tipologi Klassen**

<b>Rata-Rata Kontribusi Sektoral</b>  <b>Terhadap PDRB</b>  <b>Rata-Rata Laju</b>  <b>Pertumbuhan Sektoral</b>	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
	$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$	Sektor Prima
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Keterangan :

$Y_{\text{sektor}}$  : Pertumbuhan PDRB Kabupaten

$Y_{\text{PDRB}}$  : Pertumbuhan PDRB Provinsi

$r_{\text{sektor}}$  : Kontribusi PDRB Kabupaten

$r_{\text{PDRB}}$  : Kontribusi PDRB Provinsi

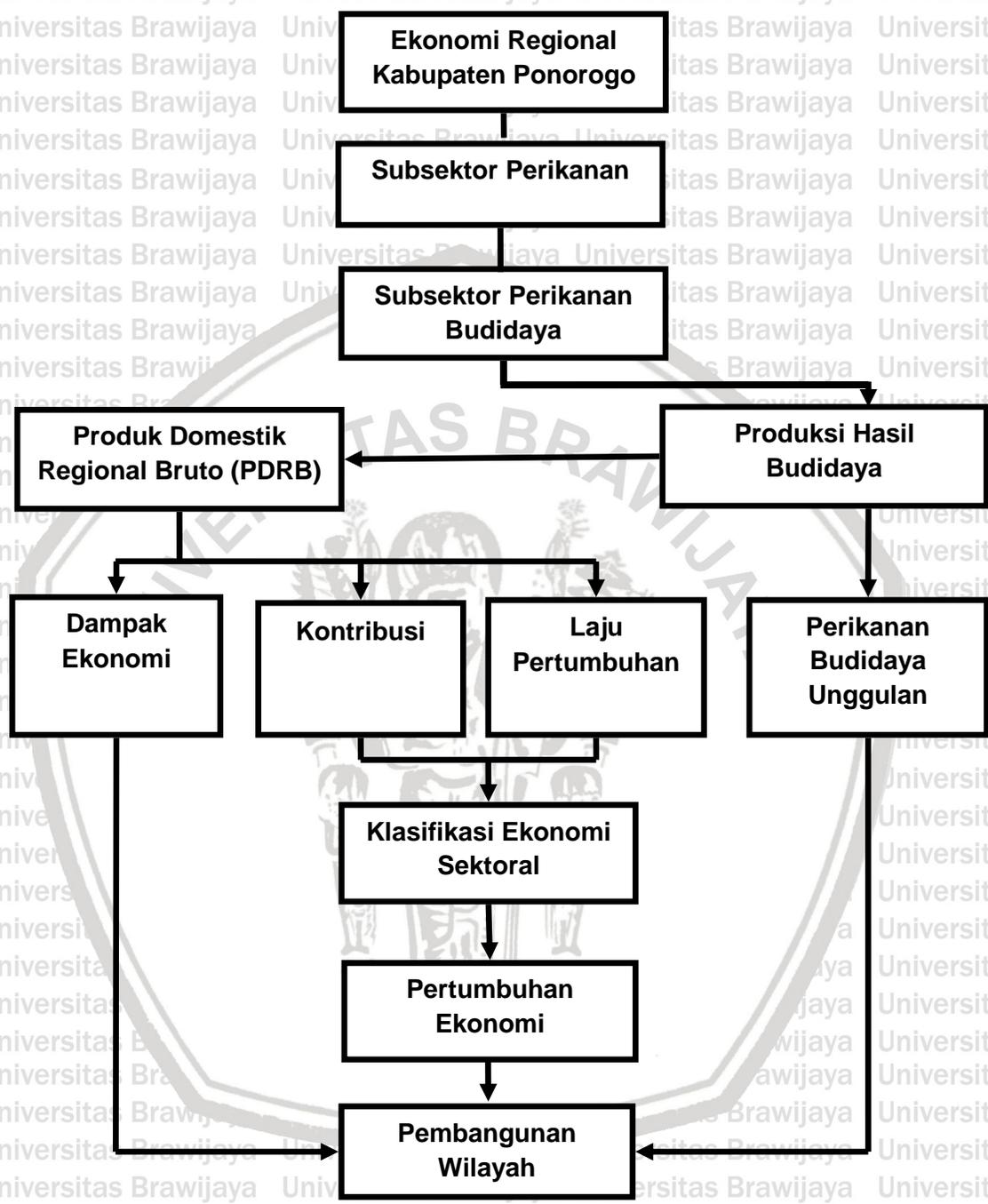
## 2.14 Kerangka Berfikir

Upaya untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas sumber daya yang bisa dijadikan komoditas unggulan. Sumber daya yang cukup besar di Kabupaten Ponorogo adalah dari subsektor pertanian dan subsektor perikanan, terutama pada subsektor perikanan budidaya.

Dengan dioptimalkannya subsektor maka dapat dicapai peningkatan pendapatan dan menggerakkan ekonomi yang lebih terjamin di Kabupaten Ponorogo. Salah satu indikator untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi adalah dengan melihat korelasi atau hubungan antara sektor terhadap PDRB. Metode yang digunakan adalah dengan kontribusi.

Kemudian mengidentifikasi subsektor yang akan menjadi basis, hal ini dilihat dengan menggunakan metode LQ dengan memanfaatkan data PDRB dan hasil budidaya. Perikanan budidaya menjadi dasar data karena output yang ingin dicapai adalah sektor unggulan perikanan budidaya.

Selanjutnya perlu adanya perhitungan *multiplier effect* pada keseluruhan wilayah. Dalam perhitungan ini akan terlihat seberapa besar dampak subsektor yang menjadi basis. Indikator yang dipakai adalah pendapatan wilayah dan tenaga kerja. Dengan rangkaian tersebut maka akan menghasilkan hasil seperti komoditas unggulan serta sektor yang bisa menjadi basis. Dari masing-masing hasil tersebut maka dapat dibuat pertimbangan dalam penyusunan kebijakan bagi sektor perikanan terutama perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 17. Kerangka Berfikir

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2017 di lakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Data diperoleh dari Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.

#### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan kemudian dianalisis dan diolah. Hasil yang muncul akan menentukan posisi subsektor yang dibahas dalam perekonomian wilayah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian, penelitian deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik (Basuki. S, 2006).

#### 3.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan guna meringkas atau menyederhanakan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini yang diantara lain:

1. Objek dalam penelitian ini adalah subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo
2. Data yang berupa PDRB Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari Badan Statistik Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir
3. Selain PDRB juga dibutuhkan data tentang perikanan budidaya yang meliputi jumlah produksi budidaya

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data atau informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang untuk suatu tujuan tertentu maupun sebagai pengetahuan ilmiah, data ini biasanya diperoleh dari pustaka-pustaka atau dari laporan peneliti terdahulu. Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di lokasi tersebut (Mardiana, 2013).

#### 3.4.2 Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, kemudian data hasil budidaya yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Data yang dikumpulkan berupa :

1. Data produksi perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015
2. Data PDRB sektor perikanan Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015
3. Data PDRB seluruh sektor Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015
4. Data PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015
5. Data produksi perikanan budidaya Provin Jawa Timur tahun 2011 – 2015
6. Data PDRB sektor perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2015
7. Data PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2015

### 3.5 Teknik Pengambilan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan atau pengambilan data. Kualitas pengambilan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting data dapat dikumpulkan dengan setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium menggunakan metode eksperimen, dan lain-lain (Sugiyono, 2014).

### 1 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan gambar, dengan menulis catatan dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Basuki. S (2006) berpendapat bahwa dokumentasi adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai soal.

Berdasarkan penjelasan diatas data dokumen yang dikumpulkan berupa data PDRB yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, kemudian juga data hasil budidaya yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo.

### 2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin memngetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2014).

Sutrisno Hadi (1986) berpendapat bahwa anggapan yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan kuisioner adalah sebagai berikut :

- a. Subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Apa yang ditanyakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subyek adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti

Data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan terhadap pihak yang terlibat langsung yaitu pembudidaya ikan dan masyarakat. Wawancara digunakan untuk memperkuat data yang didapat pada dokumentasi yang ada.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, teknik ini digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel (Sugiyono, 2014).

Malhotra (2010) berpendapat bahwa satu rangkaian variabel dan keterkaitan antar variabel yang telah dirancang untuk mewakili sebagian atau keseluruhan sistem nyata dalam proses disebut dengan metode analisis.

Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan LQ (*Location Quotient*), kontribusi, dan metode *multiplier effect*.

#### 3.6.1 Kontribusi perikanan budidaya terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo

Metode yang digunakan untuk melihat peranan subsektor perikanan adalah dengan metode kontribusi. Adapun rumus yang dapat digunakan :

$$P_n = \frac{PDRB (Pt)}{PDRB (T)} \times 100\%$$

Dimana :

$P_n$  : Nilai kontribusi

PDRB (Pt) : Nilai PDRB perikanan budidaya

PDRB (T) : Total PDRB

### 3.6.2 Posisi subsektor perikanan budidaya dalam kategori basis ekonomi

Posisi basis atau nonbasisnya subsektor perikanan dapat dilihat dengan menggunakan metode LQ, metode ini digunakan untuk melihat kondisi PDRB, laju pertumbuhan serta tenaga kerja sehingga selanjutnya dapat ditentukan dari arah kebijakan serta program.

Metode LQ membandingkan antara relative pendapatan terhadap pendapatan total wilayah dengan pangsa relative pendapatan pada sektor perikanan pada tingkat kabupaten terhadap pendapatan total kabupaten (Budiharsono, 2001).

Adapun rumus yang digunakan :

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{P_i/P_t}$$

Dimana :

LQ : Location Quotient subsektor perikanan budidaya

$V_i$  : Pendapatan dari subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo

$V_t$  : Total pendapatan sektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo

$P_i$  : Pendapatan subsektor perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur

$P_t$  : Total pendapatan sektor perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur

### 3.6.3 Produk perikanan budidaya yang menjadi unggulan

Untuk menentukan jenis ikan budidaya yang menjadi unggulan agar dapat digunakan sebagai prioritas dalam perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo, maka dibuatlah matrik dari rumus *Location Quotient* (LQ). Metode ini menggunakan

metode rasio presentase dari total perikanan budidaya, adapun rumusnya sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Pi/Pt}$$

Dimana :

LQ : Location Quotient subsektor perikanan budidaya

Vi : Produksi ikan di Kabupaten Ponorogo

Vt : Produksi total perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo

Pi : Produksi ikan budidaya di Provinsi Jawa Timur

Pt : Produksi total perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur

### 3.6.4 Perhitungan dengan *Multiplier Effect* yang dihasilkan oleh subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo

Proses selanjutnya setelah diketahui posisi sektor perikanan basis atau nonbasis kemudian melihat dampak subsektor perikanan budidaya. Metode *Multiplier Effect* digunakan untuk melihat dampak dari subsektor perikanan budidaya setelah diketahui posisi sektor perikanan merupakan basis atau non basis. Hal tersebut dikarenakan setiap peningkatan pada sektor basis maka akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Glasson(1997) berpendapat bahwa, *multiplier effect* untuk jangka pendek dihitung berdasar nilai perubahan yang terjadi berdasar pada pendapatan regional. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$MSy = \frac{\Delta Y}{\Delta Yb}$$

Dimana :

MSy : Koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator pendapatan

$\Delta Y$  : Perubahan pendapatan wilayah

$\Delta Yb$  : Perubahan pendapatan sektor basis

### 3.6.5 Klasifikasi Sektor Perikanan

Gambaran mengenai pola serta struktur ekonomi sektoral dapat diketahui dengan metode ini. Setiap sektor ekonomi dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi yaitu prima, berkembang, potensial, dan terbelakang (Widodo, 2016). Dengan kriteria dibawah ini.

1. Sektor Prima :  $R_i \geq R_n$  dan  $K_i \geq K_n$
2. Sektor Potensial :  $R_i \geq R_n$  dan  $K_i < K_n$
3. Sektor Berkembang :  $R_i < R_n$  dan  $K_i \geq K_n$
4. Sektor Terbelakang :  $R_i < R_n$  dan  $K_i < K_n$

Keterangan :

$R_i$  : Pertumbuhan PDRB Kabupaten

$R_n$  : Pertumbuhan PDRB Provinsi

$K_i$  : Kontribusi PDRB Kabupaten

$K_n$  : Kontribusi PDRB Provinsi

Kategori diatas dibagi berdasar laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya serta besar kontribusi sektor terhadap PDRB secara total, berikut tabel 5 gambaran kategori pada Kabupaten Ponorogo :

**Tabel 4. Matriks Tipologi Klassen**

<b>Rata-Rata Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB</b> <b>Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektoral</b>	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$ (Kontribusi Besar)	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$ (Kontribusi Kecil)
	$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$ (Laju Pertumbuhan Tinggi)	Sektor Prima
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$ (Laju Pertumbuhan Rendah)	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Keterangan :

- $Y_{\text{sektor}}$  : Pertumbuhan PDRB Kabupaten
- $Y_{\text{PDRB}}$  : Pertumbuhan PDRB Provinsi
- $r_{\text{sektor}}$  : Kontribusi PDRB Kabupaten
- $r_{\text{PDRB}}$  : Kontribusi PDRB Provinsi



## 4. KEADAAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

### 4.1. Kondisi Geografis Dan Topografi Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibi kota Provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111<sup>0</sup>7' hingga 111<sup>0</sup>52' Bujur Timur dan 7<sup>0</sup>49' hingga 8<sup>0</sup>20' Lintang Selatan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 Km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 21 kecamatan terdiri dari 307 desa/kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Magetan dan Kab. Madiun
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pacitan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah sampai pegunungan. Berdasar data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m diatas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m diatas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada di ketinggian diatas 700 m.

Secara topografis dan klimatologis Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18<sup>0</sup> – 31<sup>0</sup> C.

#### 4.2 Kondisi Demografi Dan Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Penduduk Kabupaten Ponorogo tersebar dalam 21 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 867.393 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 433.504 dan penduduk perempuan yang lebih banyak meskipun tidak terlalu signifikan sebesar 433.889 dengan *sex ratio* berdasarkan jenis kelamin sebesar 99,91.

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ngrayun	28.166	28.207	56.373	99,85
2	Slahung	24.269	25.155	49.424	96,48
3	Bungkal	17.013	17.577	34.590	96,79
4	Sambit	17.688	17.996	35.684	98,29
5	Sawoo	26.575	27.561	54.136	96,42
6	Sooko	10.883	11.091	21.974	98,12
7	Pudak	4.643	4.735	9.378	98,06
8	Pulung	23.332	23.349	46.681	99,93
9	Mlarak	20.645	16.184	36.829	127,56
10	Siman	21.803	21.067	42.870	103,49
11	Jetis	14.132	14.898	29.030	94,86
12	Balong	20.345	21.283	41.628	95,59
13	Kauman	19.437	19.829	39.266	98,02
14	Jambon	19.261	19.880	39.141	96,89
15	Badegan	14.627	14.750	29.377	99,17
16	Sampung	17.612	18.005	35.617	97,82
17	Sukorejo	25.710	25.032	50.742	102,71
18	Ponorogo	38.040	38.745	76.785	98,18
19	Babadan	32.831	32.621	65.452	100,64
20	Jenangan	26.611	26.345	52.956	101,01
21	Ngebel	9.881	9.579	19.460	103,15
<b>Kabupaten Ponorogo</b>		<b>433.504</b>	<b>433.889</b>	<b>867.393</b>	<b>99,91</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo paling banyak pada anak-anak di usia 10 – 19 tahun sebanyak 130.602 jiwa dan di usia dewasa 35 – 54 tahun sebanyak 261.975 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan umur disajikan pada tabel 7.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	30.477	28.638	59.085
2	5 – 9	30.356	28.630	58.986
3	10 – 14	33.235	31.118	64.353
4	15 – 19	36.447	29.802	66.249
5	20 – 24	27.716	23.903	51.619
6	25 – 29	27.494	26.892	54.386
7	30 – 34	28.604	28.671	57.275
8	35 – 39	31.784	32.230	64.014
9	40 – 44	33.353	34.359	67.712
10	45 – 49	32.780	34.110	66.890
11	50 – 54	30.792	32.567	63.359
12	55 – 59	27.639	27.620	55.259
13	60 – 64	21.861	21.219	43.080
14	65 – 69	15.611	17.418	33.029
15	70 – 74	11.612	14.626	26.238
16	75 +	13.773	22.086	35.859
<b>Jumlah/Total</b>		<b>433.504</b>	<b>433.889</b>	<b>867.393</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo adalah 485.245 jiwa. Dilihat dari besarnya angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo sebesar 467.372 jiwa yang termasuk golongan bekerja dan 17.873 dalam golongan pengangguran terbuka. Dilihat dengan data yang ada di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan cukup baik dalam penyerapan tenaga kerja. Namun dalam tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo masih tergolong rendah dengan adanya penduduk yang masih belum atau tamat serta lulusan sekolah dasar yang sudah mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel 8.

**Tabel 7. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

No	Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	Angkatan Kerja		Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran Terbuka		
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	18.338	0	18.338	14.186
2	Tidak/Belum Tamat SD	102.560	0	102.560	46.751
3	Sekolah Dasar	147.395	240	147.635	51.665
4	Sekolah Menengah Pertama	85.513	4.885	90.398	52.611
5	Sekolah Menengah Atas	41.360	3.879	45.239	21.135
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	40.372	6.540	46.912	11.554
7	Diploma I/II/III/Akademi	5.665	0	5.665	2.241
8	Universitas	26.169	2.329	28.498	5.448
<b>Jumlah Total</b>		<b>467.372</b>	<b>17.873</b>	<b>485.245</b>	<b>205.591</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

#### 4.3 Keadaan Umum Perikanan

Luas area perairan umum di Kabupaten Ponorogo adalah 252,19 Ha. Dengan luas area kolam 45,23 Ha, daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah ponorogo adalah Kecamatan Bungkal, Sokoo, dan Pulung. Jumlah produksi perikanan darat pada tahun 2015 sebesar 1.643,71 ton dengan nilai produksi mencapai Rp 2.465.584.500,00. Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Ponorogo meliputi perikanan budidaya air tawar dan pengolahan perikanan.

#### 4.3.1 Jumlah dan Pemilik Kolam di Kabupaten Ponorogo

Jumlah produksi perikanan budidaya dipengaruhi antara lain dari berapa jumlah kolam yang ada untuk budidaya, di Kabupaten Ponorogo jumlah kolam serta pemilik kolam dapat dilihat dari tabel 9.

**Tabel 8. Jumlah Kolam dan Jumlah Pemilik Kolam**

Tahun	Jumlah Kolam Per Desa	Jumlah Pemilik Kolam
2011	130	1641
2012	135	1727
2013	135	1727
2014	135	1727
2015	135	2096

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Berdasar tabel 9 yang menunjukkan jumlah kolam di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan di tahun 2012 dengan jumlah kolam 135 dan jumlah pemilik kolam sebesar 1727. Ditahun 2012 – 2015 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jumlah kolam, namun jumlah pemilik kolam naik ditahun 2015 sebesar 2096.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Kondisi Perekonomian Kabupaten Ponorogo

Perekonomian merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah atau negara. Kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari perekonomian daerah tersebut, semakin tinggi ekonomi suatu daerah maka tingkat kesejahteraan tinggi.

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran dalam pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang sudah diambil pada masa-masa lampau perlu dimonitori dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa yang akan datang, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

#### 5.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menurut lapangan usaha dibagi menjadi 17 lapangan usaha ditahun 2011 – 2015. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi.

Pada setiap sektor akan mempengaruhi nilai pertumbuhan PDRB setiap tahunnya, kenaikan nilai akan sangat membantu dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo. Adapun PDRB Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel 9.

**Tabel 9. PDRB Kab. Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Berdasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2011 - 2015**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.250.217,1	3.574.033,2	3.854.652,9	4.235.529,8	4.720.174,6
2	Pertambangan dan Penggalian	271.874,7	277.042,1	290.020,2	319.738,6	343.297,3
3	Industri Pengolahan	673.607,2	744.065,6	817.686,2	906.868,9	996.946,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.740,1	9.139,5	9.027,8	9.306,1	10.308,9
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.138,7	11.478,7	11.720,2	12.270,8	13.063,1
6	Konstruksi	908.771,0	1.013.540,7	1.117.210,6	1.265.734,8	1.371.299,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.542.146,5	1.726.912,7	1.950.059,6	2.131.027,3	2.412.583,3
8	Transportasi dan Pergudangan	143.958,5	155.429,7	176.842,7	206.127,3	234.016,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253.629,0	287.186,8	323.573,6	375.613,4	431.033,8
10	Informasi dan Komunikasi	673.149,6	746.265,3	837.375,3	919.535,6	1.018.291,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270.310,6	320.215,6	374.791,5	425.121,6	476.378,5
12	Real Estate	240.787,7	261.724,6	295.393,3	313.824,3	364.378,5
13	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	42.729,0	46.848,4	52.449,8	57.308,8	63.698,6
14	Jasa Pendidikan	614.417,7	674.340,1	698.740,0	711.940,6	778.047,4
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	764.638,5	892.805,5	1.013.937,5	1.133.289,9	1.259.677,2
16	Jasa Lainnya	75.146,4	85.239,9	95.928,1	110.083,0	128.359,1
17	Jasa Lainnya	215.072,7	221.287,6	234.198,4	260.274,5	291.287,4
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9.960.335,3</b>	<b>11.047.556,0</b>	<b>12.153.617,7</b>	<b>13.393.595,3</b>	<b>14.912.841,6</b>

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat dari setiap tahunnya mengalami kenaikan pada setiap sektor-sektornya, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Ponorogo tergolong baik dan berada di kondisi yang baik juga.

### 5.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk domestik regional bruto per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu daerah yang ditandai dengan tingginya PDRB perkapita maka akan berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat.

Nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh pendapatan total suatu daerah dan dari jumlah penduduk di setiap tahunnya. Nilai PDRB per kapita akan tinggi jika PDRB suatu daerah tinggi dan jumlah penduduknya rendah, dan sebaliknya jika PDRB tinggi tetapi jumlah penduduk tinggi nilai PDRB perkapita akan rendah, berikut PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 10. PDRB Perkapita Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015**

Tahun	PDRB (Rp Miliar)	Jumlah Penduduk	PDRB Per kapita (Rp Miliar)
2011	9.960,33	859.302	0,01159
2012	11.047,55	861.806	0,01282
2013	12.153,61	863.890	0,01407
2014	13.393,59	865.809	0,01547
2015	14.912,84	867.393	0,01719

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan PDRB Kabupaten Ponorogo meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo baik, dikarenakan PDRB yang meningkat selama 5 tahun berturut-turut.

### 5.2 Keadaan Umum Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

Sektor perikanan di Kabupaten Ponorogo meliputi perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, dilihat dari data yang didapat selama kurun waktu lima tahun menghasilkan data yang fluktuatif.

**Tabel 11. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo**

Tahun	Produksi Perairan Darat (Ton)	Nilai Produksi Perairan Darat (Rp)
2011	2.340,39	296.155.520
2012	2.367,00	307.710.330
2013	2.357,75	306.507.500
2014	2.114,99	317.250.030
2015	1.643,71	246.558.450

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

Dilihat dari tabel 12 produksi perairan darat terjadi kenaikan drastis pada tahun

2011 – 2012 yang mendapatkan nilai 27,39 ton, sedangkan penurunan drastis terjadi pada tahun 2014 – 2015 yang mendapatkan nilai 471,28 ton. Dapat dilihat dari tabel 12 produksi tertinggi perairan darat pada tahun 2012 yang mendapatkan hasil 2.367 ton dan produksi terendah perairan darat terjadi pada tahun 2015 yang mendapatkan hasil 1.643,71 ton.

Keadaan yang fluktuasi ini berpengaruh pada nilai produksi yang ada, di tahun 2011 – 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.155.481.000, kemudian mengalami kemerosotan nilai produksi drastis pada tahun 2014 – 2015 yang mendapat nilai Rp 7.069.158.000. Dilihat dari tabel 12 nilai produksi tertinggi di tahun 2014 dengan nilai Rp 31.725.033.000 dan nilai produksi yang terendah terjadi pada tahun 2015 yang mendapat nilai Rp 24.655.845.000.

### 5.2.1 Peran Sektor Perikanan PDRB Kabupaten Ponorogo

Dalam nilai PDRB keseluruhan subsektor memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar, bahkan subsektor yang menjadi sektor basis dapat mempengaruhi nilai PDRB di sektor lainnya dan dalam PDRB total. Untuk mencari subsektor basis atau

non basis dilihat dari perbandingan presentase sektor regional dengan sektor yang lebih luas seperti halnya antara kabupaten dengan provinsi.

**Tabel 12. Nilai LQ sektor perikanan berdasarkan PDRB menurut harga berlaku tahun 2011 – 2015 (miliar rupiah)**

Tahun	Vi	Vt	Pi	Pt	LQ	Keterangan
2011	104,70	9.960,33	22.539,99	112.057,71	0,05	Non Basis
2012	108,82	11.047,55	24.112,61	112.446,46	0,04	Non Basis
2013	119,09	12.153,61	26.903,95	119.278,98	0,04	Non Basis
2014	123,72	13.393,59	28.724,64	126.269,70	0,04	Non Basis
2015	128,38	14.912,84	30.326,33	133.141,82	0,03	Non Basis

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

Vi : PDRB sektor perikanan Kabupaten Ponorogo

Vt : PDRB total seluruh sektor Kabupaten Ponorogo

Pi : PDRB sektor perikanan Provinsi Jawa Timur

Pt : PDRB total seluruh sektor Provinsi Jawa Timur

Berdasar tabel 13 diketahui bahwa subsektor perikanan Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir tidak membantu perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan nilai LQ selama tahun 2011 – 2015 sektor perikanan berdasar PDRB kurang dari 1, di tahun 2011 LQ = 0,05, tahun 2012 LQ = 0,04, tahun 2013 LQ = 0,04, tahun 2014 LQ = 0,04, dan ditahun 2015 LQ = 0,03, yang dapat dikatakan non basis. Dikatakan non basis karena nilai LQ sektor perikanan < 1.

### 5.2.2 Peran Subsektor Perikanan Budidaya PDRB Kab. Ponorogo

PDRB subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo bukan termasuk sektor yang basis dikarenakan nilai LQ pada subsektor perikanan budidaya dibawah

satu. Subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo ini tidak terlalu berpengaruh terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogo. Berikut nilai LQ subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 13. Nilai LQ Subsektor Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo 2011 – 2015**

Tahun	Vi	Vt	Pi	Pt	LQ	Keterangan
2011	296.155.520	9.960.330.000	9.592.572.999.000	112.057.710.000.000	0,34	Non Basis
2012	307.710.330	11.047.550.000	11.363.129.030.000	112.446.460.000.000	0,27	Non Basis
2013	306.507.500	12.153.610.000	13.460.609.663.000	119.278.980.000.000	0,22	Non Basis
2014	317.250.030	13.393.590.000	15.360.428.784.000	126.269.700.000.000	0,19	Non Basis
2015	246.558.450	14.912.840.000	12.430.063.540.000	133.141.820.000.000	0,17	Non Basis

Sumber : Data Diolah

Vi : PDRB perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo

Vt : PDRB total Kabupaten Ponorogo

Pi : PDRB perikanan budidaya Provinsi Jawa Timur

Pt : PDRB total Provinsi Jawa Timur

Dapat dilihat dari tabel 14 bahwa nilai LQ yang diperoleh 5 tahun terakhir pada tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan. Nilai LQ tertinggi didapat pada tahun 2011 dengan nilai 0,347 sedangkan nilai LQ terendah didapat pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 0,177. Nilai LQ yang dihasilkan menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya tidak memiliki kelebihan produk untuk diekspor dan belum memenuhi kebutuhan di Kabupaten Ponorogo. Nilai LQ di Kabupaten Ponorogo yang nonbasis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk peningkatan pada

peran subsektor perikanan budidaya dengan cara menggerakkan masyarakat dengan gemar makan ikan, yang kemudian akan meningkatkan kebutuhan pasar.

Sehingga produksi perikanan akan meningkat.

### 5.3 Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

Komoditas unggulan digunakan untuk perencanaan wilayah dalam memanfaatkan daya saing produk yang dihasilkan suatu daerah tersebut. Produk unggulan disini merupakan produk yang dihasilkan didaerah tersebut mempunyai jumlah yang tinggi sedangkan produk di luar daerah tersebut mempunyai jumlah produksi yang sedikit. Komoditas unggulan disini dicari dengan metode LQ dimana untuk menentukan produk unggulan dengan indikator diatas 1 yang mana produk tersebut dikatakan produk basis atau unggulan.

#### 5.3.1 Komoditas Unggulan Kabupaten Ponorogo

Komoditas unggulan ditentukan dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah produksi dari perikanan budidaya. Metode LQ digunakan untuk menghitung hasil dari komoditas unggulan. Dibawah ini merupakan data volume produksi subsektor perikanan budidaya untuk 6 komoditas dengan volume produksi tertinggi di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 14. Volume Produksi Subsektor Perikanan Budidaya di Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 – 2015**

No	Jenis Ikan	Tahun/Ton				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ikan Mas	-	-	-	8,5	8,98
2	Ikan Nila	620	619,5	104,55	137,5	133,06
3	Ikan Gurami	92	92,8	92,2	108	145,57
4	Ikan Patin	-	-	5	9,45	9
5	Ikan Lele	2100	2005	2165	1860	1487,64
6	Ikan Mujair	-	-	-	-	13,14

Sumber : Data dan Informasi Dinas Perikanan Kabupaten Ponorogo, 2017.

Volume produksi ikan tertinggi yaitu ikan lele pada tahun 2011 – 2015 meskipun mengalami fluktuasi. Volume produksi ikan lele tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 2165 ton/tahun, sedangkan volume produksi ikan lele terendah pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 1487,64 ton/tahun.

Berikut merupakan hasil perhitungan LQ dari subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo tahun 2011 – 2015, dapat dilihat pada tabel 16 dibawah ini.

**Tabel 15. Nilai LQ Komoditas Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo 2011 – 2015**

No	Jenis Ikan	LQ					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	ikan mas	-	-	-	0,0030	0,0024	0,0027
2	ikan nila	0,0124	0,0138	0,0091	0,0134	0,0170	0,0131
3	ikan gurami	0,0080	0,0051	0,0052	0,0044	0,0249	0,0095
4	ikan patin	-	-	0,0014	0,0016	0,0004	0,0011
5	ikan lele	0,0363	0,0319	0,0274	0,0194	0,2753	0,0780
6	ikan mujair	-	-	-	-	0,0001	0,0001

Sumber : Data Diolah

Berdasar tabel diatas subsektor perikanan budidaya berdasar jenis komoditas yang memiliki nilai LQ tertinggi yaitu jenis ikan lele didapat pada tahun 2015 dengan nilai 0,2753 dengan rata-rata produksi dari tahun 2011 – 2015 sebesar 0,0780.

Sedangkan nilai LQ terendah didapat jenis ikan mujair pada tahun 2015 sebesar 0,0001. Rata-rata didapat dari LQ komoditas ikan dari tahun 2011 – 2015. Namun, di

Kabupaten Ponorogo tidak ada komoditas ikan yg menjadi unggulan karena nilai LQ masih dibawah 1, mulai dari tahun 2011 – 2015.

## 5.4 Multiplier Effect

### 5.4.1 Dampak Komoditas Perikanan Budidaya

Efek pengganda ada dikarenakan peningkatan sektor basis yang mampu mempengaruhi total keseluruhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan sektor ekonomi basis mampu mendatangkan pemasukan bagi daerah yang melakukan kegiatan pengiriman produk.

**Tabel 16. Analisis *Multiplier Effect* Komoditas Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 dan 2013**

No	Jenis Ikan	Nilai Produksi		Selisih	M <sub>sy</sub> = $\Delta Y / \Delta y_b$
		2012	2013		
1	ikan mas			0	0
2	ikan nila	8,890,500	1,897,850	-6,992,650	5.0688
3	ikan gurami	2,203,400	2,005,900	-197,500	0.1432
4	ikan patin		70,000	70,000	-0.0507
5	ikan lele	21,506,400	27,247,000	5,740,600	-4.1612
6	ikan mujair			0	0
	Jumlah	32,600,300	31,220,750	-1,379,550	

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

Y : Jumlah PDRB Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

Y<sub>b</sub> : Jumlah PDRB Komoditas Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

$\Delta Y$  : Perubahan PDRB Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

$\Delta Y_b$  : Perubahan PDRB Komoditas Perikanan Kabupaten Ponorogo

M<sub>sy</sub> : Koefisien *Multiplier Effect*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien komoditas yang berbeda-beda, ada yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Kenapa positif dan kenapa negatif, dikatakan nilai *multiplier effect* positif dan negatif dihitung dari selisih antara

tahun yang dihitung kemudian dibagi dengan jumlah selisih komoditas tahun yang dihitung. Ada dua jenis komoditas yang memberikan dampak positif yaitu pada komoditas ikan nila dan ikan gurami, dengan nilai *multiplier effect* pada ikan nila sebesar 5,0688/Rp 5.068,8 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan nila akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 5.068,8 dan nilai *multiplier effect* pada ikan gurami sebesar 0,1432/Rp 143,2 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan gurami akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 143, 2.

*Multiplier effect* atau efek pengganda ini berhubungan dengan komoditas unggulan dimana akan menunjang pendapatan di sektor perikanan. Setiap kenaikan 1 satuan pada komoditas unggulan akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, semakin tinggi jumlah komoditas unggulan semakin tinggi juga nilai yang dihasilkan.

**Tabel 17. Analisis *Multiplier Effect* Komoditas Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 dan 2015**

No	Jenis Ikan	Nilai Produksi		Selisih	M <sub>sy</sub> = ΔY/ΔY <sub>b</sub>
		2014	2015		
1	ikan mas	255,000	269,400	14,400	-0.0273
2	ikan nila	1,774,900	3,581,778	1,806,878	-3.4240
3	ikan gurami	2,185,000	4,250,994	2,065,994	-3.9150
4	ikan patin	133,000	155,200	22,200	-0.0421
5	ikan lele	25,000,000	20,326,301	-4,673,699	8.8566
6	ikan mujair		236,520	236,520	-0.4482
Jumlah		29,347,900	28,820,193	-527,707	

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

Y : Jumlah PDRB Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

Yb : Jumlah Komoditas Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

$\Delta Y$  : Perubahan PDRB Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

$\Delta Y_b$  : Perubahan Komoditas Perikanan Kabupaten Ponorogo

Msy : Koefisien *Multiplier Effect*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien komoditas yang berbeda-beda, ada yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Kenapa positif dan kenapa negatif, dikatakan nilai *multiplier effect* positif dan negatif dihitung dari selisih antara tahun yang dihitung kemudian dibagi dengan jumlah selisih komoditas tahun yang dihitung. Hanya satu jenis komoditas saja yang memberikan dampak positif yaitu pada komoditas ikan lele dengan nilai *multiplier effect* sebesar 8,8566/Rp 8.856,6 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan lele akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 8.856,6.

*Multiplier effect* atau efek pengganda ini berhubungan dengan komoditas unggulan dimana akan menunjang pendapatan di sektor perikanan. Setiap kenaikan 1 satuan pada komoditas unggulan akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah, semakin tinggi jumlah komoditas unggulan semakin tinggi juga nilai yang dihasilkan. Dampak dari *multiplier effect* ini antara lain meningkatnya iklim investasi, dan yang paling utama adalah mempercepat proses distribusi yang meningkatkan rantai pasok (*supply chain*).

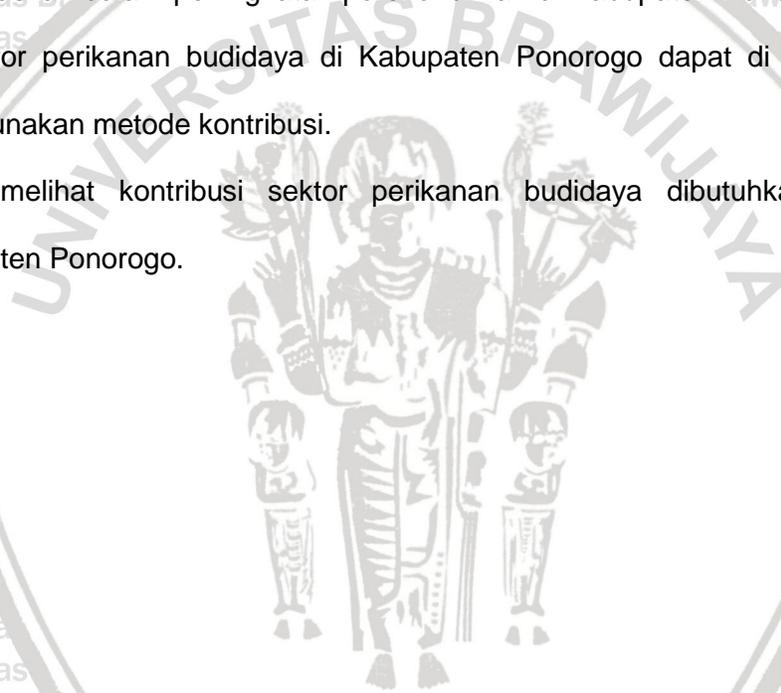
## 5.5 Kontribusi Subsektor Perikanan Budidaya Kabupaten Ponorogo

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu.

Terkait dengan perikanan, semakin banyak jumlah perikanan dan nilai investasinya akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo sektor perikanan itu sendiri. Kedua faktor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Kontribusi pada sektor perikanan dan kelautan serta sektor ekonomi lainnya terhadap pendapatan wilayah dapat menentukan kelayakan setiap sektor untuk diprioritaskan dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Kontribusi subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo dapat di analisis dengan menggunakan metode kontribusi.

Untuk melihat kontribusi sektor perikanan budidaya dibutuhkan data PDRB Kabupaten Ponorogo.



**Tabel 18. PDRB Kab. Ponorogo Dan PDRB Sektor Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2011 – 2015.**

Total PDRB	2011	2012	2013	2014	2015
Total PDRB Kabupaten	9.960.335,3	11.047.556,0	12.153.617,7	13.393.595,3	14.912.841,6
Ponorogo Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.250.217,1	3.574.033,2	3.854.652,9	4.235.529,8	4.720.174,6
Sektor Perikanan	48.606,8	58.329,5	67.237,1	74.654,8	81.401,1
Perikanan Budidaya	29.615,5	30.771,0	30.650,7	31.725,0	24.655,8

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

Untuk mencari kontribusi dibutuhkan data yang berupa total PDRB, nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian sector perikanan, dan lebih ke dalam lagi membutuhkan data dari perikanan budidaya. Tabel diatas adalah data PDRB yang digunakan untuk menganalisis kontribusi sektor perikanan dan kontribusi subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 19. Kontribusi Sektor Perikanan dan Subsektor Perikanan Budidaya Kab. Ponorogo Tahun 2011 – 2015.**

Keterangan	Kontribusi %					Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Perikanan terhadap Total PDRB	0,49	0,53	0,55	0,56	0,55	0,53
Perikanan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,50	1,63	1,74	1,76	1,72	1,67
Perikanan Budidaya terhadap Total PDRB	0,30	0,28	0,25	0,24	0,17	0,25
Perikanan Budidaya terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,91	0,86	0,80	0,75	0,52	0,77
Perikanan Budidaya terhadap Sektor Perikanan	60,93	52,75	45,59	42,50	30,29	46,41

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat sektor perikanan hanya berkontribusi hanya dengan 0,53% terhadap total PDRB, hal ini dapat dilihat sektor perikanan tidak terlalu berkontribusi dalam perekonomian regional daerah Kabupaten Ponorogo. Kontribusi tertinggi sektor perikanan terhadap total PDRB terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 0,56% sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2011 dengan nilai 0,49%. Untuk kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendapat nilai sebesar 1,67%. Kontribusi tertinggi didapat pada tahun 2014 dengan nilai kontribusi sebesar 1,76% dan nilai kontribusi terendah ditahun 2011 sebesar 1,50%.

Sektor perikanan budidaya memiliki kontribusi terhadap total PDRB sebesar 0,25%. Kontribusi sektor perikanan budidaya tertinggi didapat pada tahun 2011 dengan nilai 0,30%, sedangkan kontribusi sektor perikanan budidaya terendah di dapat pada tahun 2015 dengan nilai 0,17% saja. Untuk kontribusi perikanan budidaya terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendapat nilai sebesar 0,77%. Kontribusi tertinggi perikanan budidaya didapat pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 0,91%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2015 yang mendapat nilai sebesar 0,52%. Kemudian, untuk nilai kontribusi sektor perikanan budidaya terhadap sektor perikanan didapat nilai rata-rata sebesar 46,41%. Kontribusi tertinggi didapat pada tahun 2011 yang mendapat nilai sebesar 60,93%, dan nilai kontribusi terendah didapat pada tahun 2015 dengan nilai kontribusi sebesar 30,29%.

Kontribusi perikanan budidaya dipengaruhi dengan pendapatan pada subsektor yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada *multiplier effect* mempengaruhi besar kecilnya kontribusi suatu sektor terhadap pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo.

## 5.6 Klasifikasi Sektoral dan Subsektoral Kabupaten Ponorogo

Berdasar Pendapatan Daerah Regional Bruto perekonomian dibagi menjadi 17 sektor. Sektor-sektor digunakan untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi regional. Untuk mencari klasifikasi ini peneliti menggunakan analisis Tipologi Klassen yang digunakan untuk gambaran, pola, serta struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah hasil klasifikasi sektor yang disajikan pada tabel 19.

**Tabel 20. Klasifikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015**

Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB	Rata-Rata PDRB	Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan PDRB	Q
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,328	0,060	0,905	0,963	2
Pertambangan dan Penggalian	0,025	0,060	0,568	0,963	4
Industri Pengolahan	0,069	0,060	0,979	0,963	1
Pengadaan Listrik dan Gas	0,001	0,060	0,453	0,963	4
Pengolahan Air, Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,001	0,060	0,429	0,963	4
Kontruksi	0,095	0,060	1,034	0,963	1
Perdagangan Besar dan Eceran, Bengkel	0,163	0,060	1,163	0,963	1
Transportasi dan Pergudangan	0,015	0,060	1,126	0,963	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,028	0,060	1,294	0,963	3
Informasi dan Komunikasi	0,070	0,060	1,020	0,963	1
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,031	0,060	1,381	0,963	3
Real Estate	0,025	0,060	1,055	0,963	3
Jasa Perusahaan	0,004	0,060	0,962	0,963	4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,058	0,060	0,615	0,963	4
Jasa Pendidikan	0,084	0,060	1,253	0,963	1
Jasa Kesehatandan Kegiatan Sosial	0,008	0,060	1,430	0,963	3
Jasa Lainnya	0,020	0,060	0,713	0,963	4

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

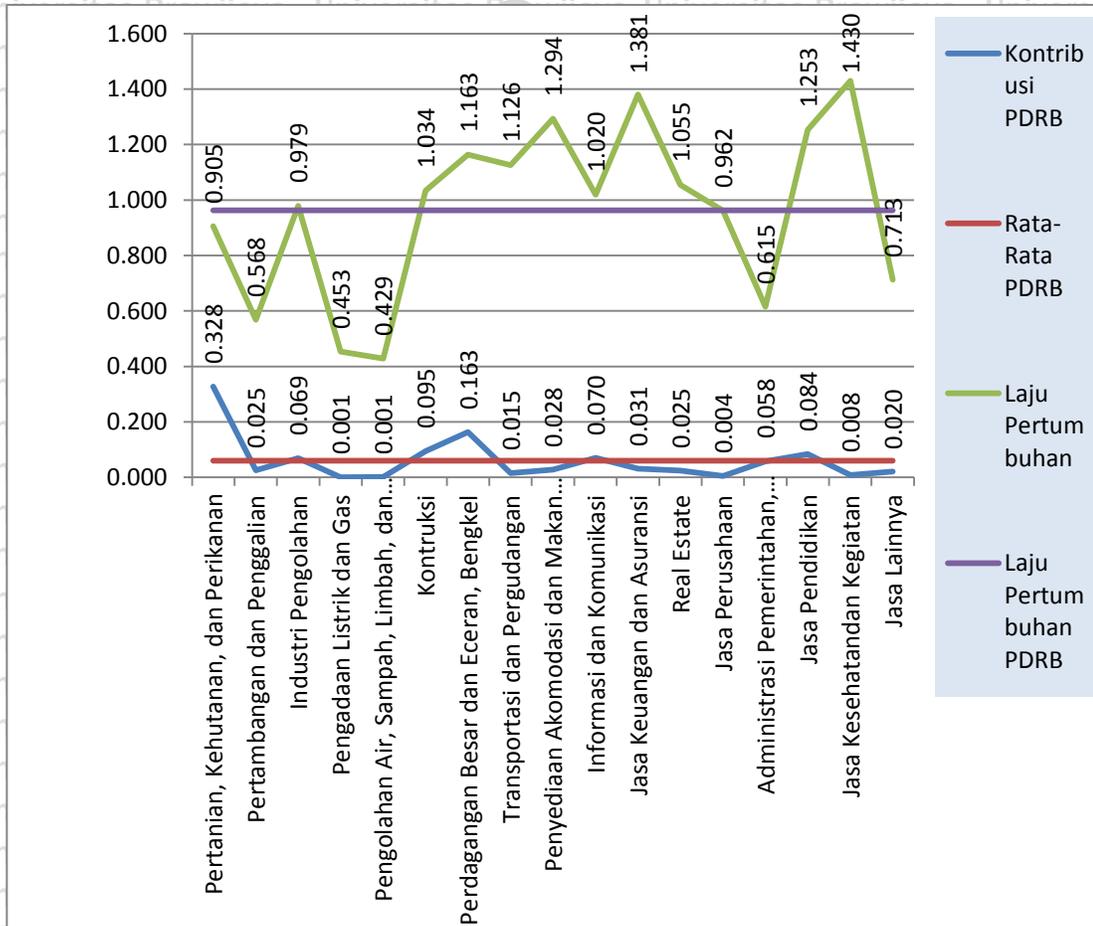
Q : Quadrant/ kategori

1 : Sektor Prima

2 : Sektor Potensial

3 : Sektor Berkembang

4 : Sektor Terbelakang



Gambar 18. Grafik sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perekonomian di setiap sektor ada yang sudah berkontribusi dalam pembangunan dan menyejahterakan ekonomi Kabupaten Ponorogo. Di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan bahwa sektor ini sudah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan nilai sebesar 0,328 diatas rata-rata dengan nilai 0,060.

Dari tabel 20 memperlihatkan bahwa PDRB Kabupaten Ponorogo dikategorikan dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

Klasifikasi masing-masing sektor dapat dilihat dari tabel matriks dibawah ini.

**Tabel 21. Matriks Klasifikasi Sektor Perekonomian Kabupaten Ponorogo**

Rata-Rata Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	Y sektor $\geq$ Y PDRB (Kontribusi Besar)	Y sektor $<$ Y PDRB (Kontribusi Kecil)
	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektor	Sektor Prima (1)
r sektor $\geq$ r PDRB (Laju Pertumbuhan Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan</li> <li>2. Kontruksi</li> <li>3. Perdagangan Besar dan Eceran, Bengkel</li> <li>4. Informasi dan Komunikasi</li> <li>5. Jasa Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transportasi dan Pergudangan</li> <li>2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>3. Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>4. Real Estate</li> <li>5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> </ol>
r sektor $\geq$ r PDRB (Laju Pertumbuhan Kecil)	<p><b>Sektor Potensial (2)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> </ol>	<p><b>Sektor Terbelakang (4)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertambangan dan Penggalan</li> <li>2. Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>3. Pengolahan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>4. Jasa Perusahaan</li> <li>5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>6. Jasa Lainnya</li> </ol>

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis Tipologi Klassen pada tabel diatas menunjukkan sektor perekonomian pada Kabupaten Ponorogo yang terbagi menjadi 4 klasifikasi sektor

yaitu sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang.

Berikut penjelasan dari Tipologi Klassen diatas :

#### Sektor Prima

Dalam analisis Tipologi Klassen sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak ada dalam klaifikasi sektor prima. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Ponorogo masih belum berkontribusi dengan baik dan sektor-sektor tersebut butuh waktu yang lama sehingga menjadi sektor yang prima. Namun ada lima sektor yang berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Ponorogo diantaranya sektor industri pengolahan, sektor Kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, bengkel, sektor informasi dan komunikasi, serta yang terakhir ada sektor jasa pendidikan.

#### a. Sektor Potensial

Dari data yang dihasilkan ada satu sektor saja yang termasuk dalam sektor potensial yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kontribusi sektoral yang besar, akan tetapi laju pertumbuhannya dibawah rata-rata keseluruhan.

#### b. Sektor Berkembang

Sektor berkembang merupakan sektor yang memiliki potensial untuk dikembangkan dan memungkinkan masuk dalam klasifikasi bisa berkembang dikemudian hari. Hal ini dikarenakan sektor berkembang memiliki kontribusi yang kecil akan tetapi pertumbuhannya diatas rata-rata. Ada lima sektor yang masuk dalam klasifikasi dalam sektor berkembang ini antara lain yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

### c. Sektor Terbelakang

Sektor terbelakang merupakan klasifikasi sektor yang paling bawah dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu penyebabnya dikarenakan sumber daya alam yang kurang hal ini terjadi pada sektor-sektor yang pemanfaatannya membutuhkan sumber daya alam. Sektor yang termasuk dalam klasifikasi ini yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan Listrik dan gas, sektor pengolahan air, sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa lainnya. Sektor yang termasuk dalam klasifikasi ini harus diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih pada pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo.

#### 5.6.1 Klasifikasi Sektoral Perikanan Kabupaten Ponorogo

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor potensial yang ada di Kabupaten Ponorogo dimana sektor ini berkontribusi dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Dengan kontribusi yang besar terhadap PDRB dan laju pertumbuhan yang dibawah rata-rata membuat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk dalam klasifikasi sektor potensial. Dalam hal ini pemerintahan harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya dengan penambahan program atau ditambah lagi dengan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat agar sektor tersebut dapat masuk dalam sektor prima. Dalam sektor ini dibagi atas beberapa subsektor lagi diantaranya dapat dilihat pada tabel 22.

**Tabel 22. Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo 2011 – 2015**

Lapangan Usaha	Kontribusi PDRB	Rata-Rata PDRB	Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan PDRB	Q
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,264	0,060	0,905	0,963	2
1.Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,252	0,060	0,881	0,963	2
a.Tanaman pangan	0,149	0,060	0,858	0,963	2
b.Tanaman Hortikultura	0,043	0,060	0,683	0,963	4
c.Tanaman Perkebunan	0,017	0,060	0,898	0,963	4
d.Peternakan	0,040	0,060	1,012	0,963	3
e.Jasa Pertanian dan Perburuan	0,003	0,060	0,910	0,963	4
2.Kehutanan dan Penebangan	0,007	0,060	1,736	0,963	3
3.Perikanan	0,005	0,060	1,174	0,963	3

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

Q : Quadran / kategori

1 : Sektor Prima

2 : Sektor Potensial

3 : Sektor Berkembang

4 : Sektor Terbelakang

Dari tabel 22 dapat menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan dalam klasifikasi sektor

prima, sektor potensial, sektor berkembang dan sektor terbelakang. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini.

**Tabel 23. Matriks Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo**

<b>Rata-Rata Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB</b>  <b>Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektoral</b>	<b>Y sektor ≥ Y PDRB (Kontribusi Besar)</b>	<b>Y sektor &lt; Y PDRB (Kontribusi Kecil)</b>
	<b>Sektor Prima (1)</b>  Tidak Ada	<b>Sektor Berkembang (3)</b>  1. Peternakan 2. Kehutanan dan Penebangan 3. Perikanan
<b>r sektor ≥ r PDRB</b>	<b>Sektor Potensial (2)</b>  1. Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian 2. Tanaman Pangan	<b>Sektor Terbelakang (4)</b>  1. Tanaman Holtikultura 2. Tanaman Perkebunan 3. Jasa pertanian, dan Perburuan
<b>r sektor &lt; r PDRB</b>		

Sumber : Data Diolah

a. Sektor Prima

Dalam analisis tipologi klasen ini dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi dalam beberapa subsektor. Namun tidak ada satu pun dalam subsektornya masuk dalam klasifikasi prima. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor



di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan belum berkontribusi penuh dalam perekonomian daerah di Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sektor Potensial

Dari data yang dihasilkan ada dua subsektor yang termasuk dalam sektor potensial yaitu subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa subsektor tersebut memiliki kontribusi sektoral yang besar, akan tetapi laju pertumbuhannya dibawah rata-rata keseluruhan.

#### c. Sektor Berkembang

Sektor berkembang merupakan subsektor yang memiliki potensial untuk dikembangkan dan memungkinkan masuk dalam klasifikasi bisa berkembang dikemudian hari. Hal ini dikarenakan subsektor berkembang memiliki kontribusi yang kecil akan tetapi pertumbuhannya diatas rata-rata. Ada tiga subsektor yang masuk dalam klasifikasi dalam sektor berkembang ini antara lain yaitu subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan penebangan, subsektor perikanan. Perlu adanya penanganan lebih lanjut agar subsektor tersebut dapat lebih maju dan dapat mempengaruhi perekonomian yang lebih baik bagi Kabupaten Ponorogo.

#### d. Sektor Terbelakang

Sektor terbelakang merupakan klasifikasi subsektor yang paling bawah dibandingkan dengan subsektor lainnya. Salah satu penyebabnya dikarenakan sumber daya alam yang kurang hal ini terjadi pada subsektor-subsektor yang pemanfaatannya membutuhkan sumber daya alam. Subsektor yang termasuk dalam klasifikasi ini yaitu subsektor tanaman holtikultura, subsektor tanaman perkebunan, dan subsektor jasa pertanian dan perburuan. Subsektor yang termasuk dalam klasifikasi ini harus diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih pada pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo.

## 5.7 Implikasi Hasil Penelitian Peran Subsektor Perikanan Budidaya Terhadap Ekonomi Wilayah di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data produksi dan nilai perikanan budidaya tahun 2011 – 2015 yang menyangkut kontribusi perikanan budidaya terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo memiliki potensi dan berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan analisis sektor basis didapatkan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo termasuk sektor nonbasis dimana nilai LQ yang di dapat lebih kecil dari 1. Komoditas unggulan pada sektor perikanan budidaya LQ nya tidak ada yang lebih dari 1, namun yang menjadi unggulan adalah ikan lele dengan nilai LQ 0,2753.

Hasil multiplier effect yang didapat pada sektor perikanan budidaya berdampak positif dan negatif. Hanya ada satu komoditas yang berdampak positif dan tertinggi yaitu ikan lele. Hal ini menunjukkan bahwa terdapaet efek pengganda pada ikan tersebut dimana setiap peningkatan 1 satuan dapat meningkatkan nilai dari ikan tersebut. Kontribusi yang dihasilkan pada perikanan budidaya mengalami fluktuasi pada tahun 2011-2015 , ini menyebabkan kontribusi tersebut masih terbilang kurang baik dan perlu adanya penanganan lebih dari pemerintah. Dengan demikian kita dapat mengklasifikasikan subsektor perikanan budidaya menggunakan Tipologi Klassen, sehingga dari komoditas perikanan budidaya dapat diklasifikasikan kedalam sektor prima, potensial, berkembang, dan terbelakang.

Dalam usaha untuk mengoptimalkan subsektor perikanan budidaya pada sektor nonbasis, mengoptimalkan komoditas unggulan, mengoptimalkan *multiplier effect* yang ada, mengoptimalkan kontribusi subsektor perikanan budidaya, serta meningkatkan sektor perikanan untuk menjadi sektor prima maka diperlukan upaya dalam pengembangannya. Hal ini diperlukan karena untuk meningkatkan nilai dan

kontribusi sektor perikanan budidaya terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo.

Beberapa implikasi hasil penelitian dari setiap subsektor perikanan adalah sebagai berikut :

1. Subsektor perikanan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam sektor nonbasis

yang ditunjukkan dengan hasil analisis LQ, dimana nilai LQ yang didapat lebih kecil dari 1. Dengan diketahuinya hal tersebut diharapkan dapat menjadi

gambaran untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo agar dapat lebih

memperhatikan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo dikarenakan

sumberdaya yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, serta memberi

perhatian lebih terhadap para palaku usaha perikanan budidaya dan para pelaku

usaha perikanan agar hasil budidaya dan usaha perikanan dapat meningkat.

2. Pada komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Ponorogo perlu dibutuhkan

upaya untuk mempertahankan, agar komoditas tersebut tetap berada pada

posisi unggulan dan diharapkan dapat mengekspor produk unggulan tersebut.

Upaya untuk pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan tetap

mempertahankan produktivitas dan nilai pada komoditas tersebut. Komoditas

yang menjadi unggulan ini diharapkan dapat diolah secara optimal oleh

pemerintah sehingga dapat meningkatkan nilai komoditas tersebut. Upaya

pengembangan tersebut perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah,

Dinas Perikanan, masyarakat, dan pelaku usaha pengolahan perikanan.

3. Melihat dari efek pengganda atau *multiplier effect* yang dihasilkan oleh

komoditas yang berdampak positif atau komoditas unggulan maka upaya yang

dilakukan oleh pemerintah ialah mempertahankan nilai pada komoditas tersebut

dan melakukan upaya lebih untuk dapat mengekspor komoditas tersebut

dikarenakan pada saat komoditas tersebut dapat diekspor maka nilai yang dihasilkan akan meningkat.

Untuk subsektor perikanan budidaya dari kategori berkembang, dengan menyediakan dan mensosialisasikan pentingnya budidaya dapat membantu pembudidaya ikan untuk meningkatkan jumlah produksi ikan sehingga pendapatan pun dapat meningkat. Pada kategori berkembang yaitu dengan membangun pasar khusus perikanan, membangun sarana dan prasarana untuk budidaya serta mengoptimalkan peran koperasi perikanan, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan dalam memproduksi ikan dan juga mampu memasarkan komoditas ikan budidaya dengan baik.



## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Hasil analisa mengenai peran dan dampak subsektor perikanan budidaya terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa subsektor perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Ponorogo perlu dikembangkan lagi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih baik lagi terhadap perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Hasil analisa lainnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Sektor perikanan berdasarkan nilai PDRB di Kabupaten Ponorogo bukanlah sektor basis. Hal ini dikarenakan nilai LQ sektor perikanan dari tahun 2011-2015 mendapatkan nilai LQ kurang dari 1 yakni 0,052, 0,046, 0,043, 0,041, 0,038. Sedangkan subsektor perikanan budidaya juga bukan menjadi subsektor basis dikarenakan subsektor ini memiliki nilai  $LQ \leq 1$ . Nilai LQ yang di dapat pada tahun 2011 sebesar 0,347, pada tahun 2012 sebesar 0,275, pada tahun 2013 sebesar 0,223, pada tahun 2014 sebesar 0,194, dan pada tahun 2015 sebesar 0,177.
- 2) Komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo berjumlah 6 komoditas yang berasal dari perairan darat. Komoditas unggulan tersebut ialah ikan mas, ikan nila, ikan gurami, ikan patin, ikan lele, dan ikan mujair. Komoditas tertinggi ialah ikan lele dengan nilai LQ sebesar 0,2753 pada tahun 2015 dan komoditas terendah didapat ikan mujair dengan nilai LQ 0,0001 pada tahun 2015.
- 3) Multiplier effect yang dihasilkan berdampak positif dan negatif. Di tahun 2012 – 2013 ada dua jenis komoditas yang memberikan dampak positif yaitu pada komoditas ikan nila dan ikan gurami, dengan nilai *multiplier effect* pada ikan nila sebesar 5,0688/Rp 5.068,8 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada

komoditas ikan nila akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 5.068,8 dan nilai *multiplier effect* pada ikan gurami sebesar 0,1432/Rp 143,2 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan gurami akan meningkatkan nilai subsector perikanan budidaya sebesar Rp 143,2. Di tahun 2014 – 2015 hanya terdapat satu komoditas saja yang berdampak positif dan tertinggi. Komoditas yang berdampak positif dengan nilai yang tertinggi yaitu ikan lele dengan nilai 8,8566/Rp 8.856,6 yang artinya setiap peningkatan Rp 1 pada komoditas ikan lele akan meningkatkan nilai subsektor perikanan budidaya sebesar Rp 8.856,6.

- 4) Kontribusi subsektor perikanan di Kabupaten Ponorogo terhadap PDRB total mengalami fluktuasi di tiap tahunnya yakni pada tahun 2011 sebesar 0,49%, pada tahun 2012 sebesar 0,53%, 2013 sebesar 0,55%, 2014 sebesar 0,56%, dan 2015 sebesar 0,55%. Dengan keadaan fluktuasi tersebut kontribusi perikanan terhadap PDRB total masih belum terbilang dalam kontribusi yang baik. Kontribusi subsektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2011 sebesar 1,50%, di tahun 2012 sebesar 1,63%, 2013 sebesar 1,74%, 2014 sebesar 1,76%, dan 2015 sebesar 1,72%. Sedangkan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap PDRB total juga mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 sebesar 0,30%, 2012 sebesar 0,28%, 2013 sebesar 0,25%, 2014 sebesar 0,24%, dan 2015 sebesar 0,17%. Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami penurunan dengan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 0,91%, 2012 sebesar 0,86%, 2013 sebesar 0,80%, 2014 sebesar 0,75%, dan 2015 sebesar 0,52%. Kemudian, yang terakhir kontribusi perikanan budidaya terhadap sektor perikanan yang juga terus

mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, pada tahun 2011 subsektor perikanan budidaya mendapatkan nilai kontribusi sebesar 60,93%, namun di tahun 2012 mengalami penurunan dengan nilai 52,75%, di tahun 2013 sebesar 45,59%, di tahun 2014 sebesar 42,50%, dan di tahun 2015 sebesar 30,29%.

5) Klasifikasi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Ponorogo masuk dalam sektor potensial. Hal ini dikarenakan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terbilang baik dengan di atas rata-rata, namun dikatakan masih dalam klasifikasi sektor potensial karena laju pertumbuhannya yang masih dibawah rata-rata. Kontribusi sektor perikanan terhadap total PDRB mendapatkan rata-rata sebesar 0,328% selama lima tahun terakhir dan perikanan budidaya terhadap PDRB disini masih dalam klasifikasi sektor yang berkembang dimana kontribusinya masih dibawah rata-rata dengan nilai 0,005% saja, namun laju pertumbuhannya melambung tinggi mendapatkan nilai sebesar 1,174%.

## 6.2 Saran

### 1. Pengusaha

a) Saran yang dapat dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam memajukan dan mengembangkan sektor perikanan terutama pada subsektor perikanan budidaya Kabupaten Ponorogo antara lain dengan memaksimalkan kinerja para pembudidaya dalam memproduksi komoditas-komoditas ikan dan proses pemeliharaan yang benar sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo.

b) Perlu ada peningkatan kontribusi dan pengembangan hasil produksi budidaya agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDRB sehingga

pada tahun-tahun berikutnya subsektor perikanan budidaya bisa menjadi sektor basis dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Ponorogo.

## 2. Pemerintah

a) Sarana dan prasarana pada sektor perikanan dan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Ponorogo harus bisa di kembangkan lagi guna meningkatkan hasil produksi budidaya, serta peningkatan kualitas pembudidaya serta produksinya melalui penyuluhan serta bantuan material.

b) Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total PDRB agar terus meningkat dengan memperhatikan nilai yang dihasilkan disetiap komoditas hasil budidaya terutama pada sistem pemasarannya.

c) Perlu diadakannya penelitian berlanjut mengenai strategi pengembangan teknologi budidaya agar dapat memanfaatkan sumber daya perairan yang ada secara optimal dan memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

Azwar, S. 2005. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Badan Pusat Statistik. 2007. *Statistik Indonesia 2006*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2015*. Badan Pusat Statistik. Ponorogo

Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra

Budi Harsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta.

Dahuri, R., et. al. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Edisi Revisi. Pradnya Paramita. Jakarta. Hal 81 – 100.

Dahuri, R., 2004. *Perkembangan dan Pembangunan Perikanan Budidaya ke Depan*.

Djarjah, Abbas Siregar. 2001. *Pembenihan Ikan Mas*. Yogyakarta : Kanisius

Effendi, I. 2004. *Pengantar Akuakultur*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Emilia dan Imelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Jurusan Ilmu Ekonomi, FE. Universitas Jambi : Jambi

Glasson, J. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Gusrina.2008. *Budidaya Ikan Jilid 1*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Haslan F. 2016. Analisis Peranan Subsektor Perikanan Tangkap Terhadap Pembangunan Daerah dan Penentuan Komoditas Hasil Tangkapan Unggulan di Kota Sibolga. *Maspari Jurnal*. Juli 2016.

Kordi, K Ghufron dan Andi Baso Tancung. 2009. *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budidaya Perairan*. Rineka Cipta : Jakarta

Kusumawati. N. 2012. Analisis Ekonomi Basis dan Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara. Mei 2012.

Makalah pada Simposium Nasional “Perkembangan dan Inovasi Ilmu dan Teknologi Akuakultur — MAI”. Semarang. 27—29 Januari 2004. 13 hal.

Saanin, H. 1968. *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan*. Binacipta. Bandung. 256 Hal

Sadono Sukirno. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Santoso, R. H. 2011. *Uji Coba Penggunaan Pelet yang Mengandung Imunoglobulin-Y (Ig-Y) Anti Koi herpesvirus sebagai Pencegah Penyakit pada Ikan Mas (Cyprinus carpio)*. Skripsi. Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor. 51 Hal

Sasana, Hadi. 2006. *Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Dinamika Pembangunan* Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 : 145-170

Soekartawi, 1993, *Manajemen Pemasaran Dalam Bisnis Modern*, Pustaka Harapan, Jakarta.

Soekartawi, 2002, *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil – Hasil Pertanian Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiarto. 1988. *Nilai*. Penebar Swadaya. Jakarta. 105 halaman

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sutrisno Hadi. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset

Tarigan. R. 2007. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

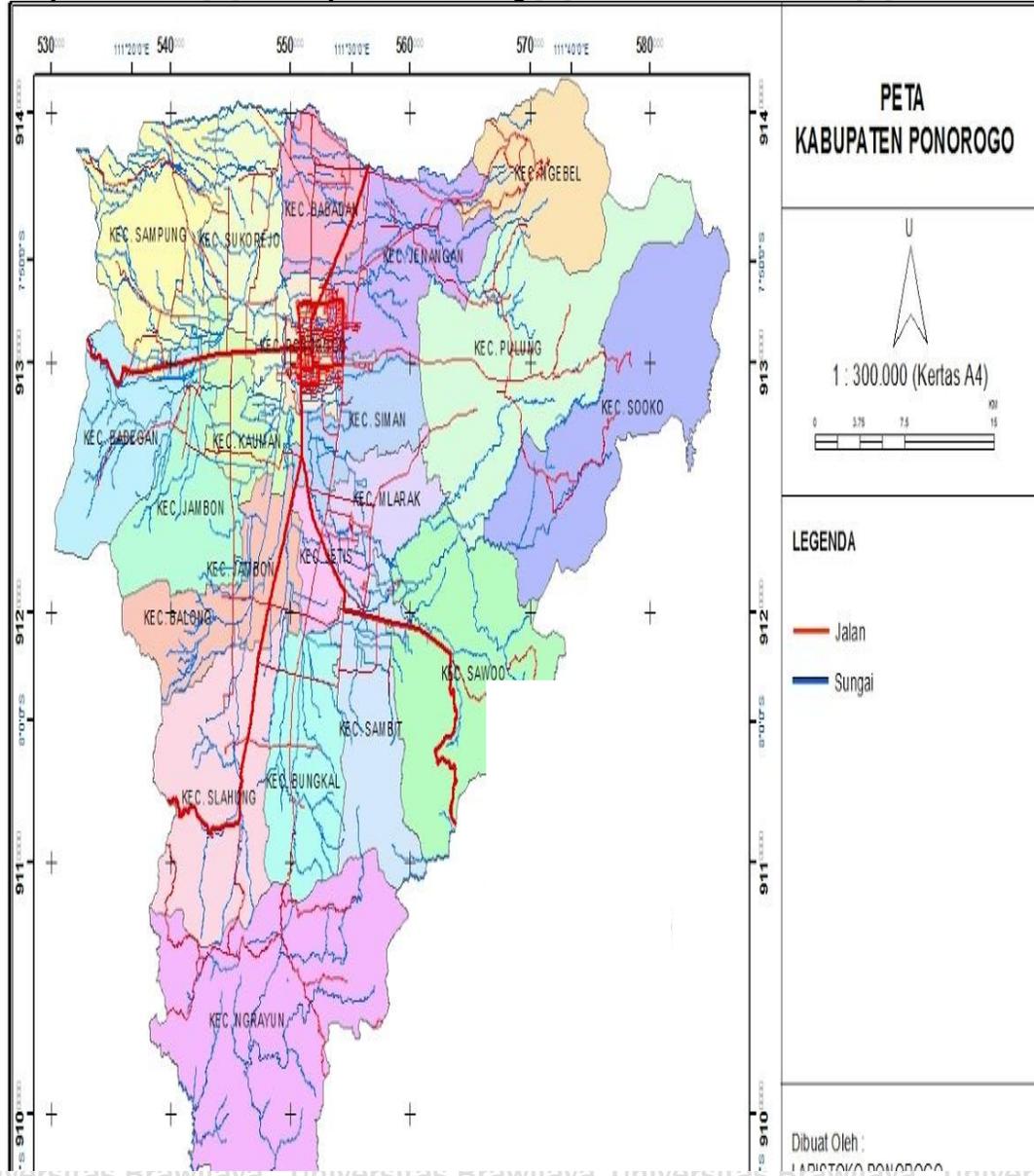
Tike Dwi. P. 2014. *Dampak Usaha Perikanan Budidaya Terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Lahan Pasang Surut Kabupaten Banyuwasin Propinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia*.

Todaro, Michael. P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 & 2. Jakarta : Erlangga

Widodo. T. 2006. *Perencanaan Pembangunan ; Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Kabupaten Ponorogo



Sumber : Bappeda, 2016

## Lampiran 2. PDRB Kab. Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.250.217,1	3.574.033,2	3.854.652,9	4.235.529,8	4.720.174,6
2	Pertambangan dan Penggalian	271.874,7	277.042,1	290.020,2	319.738,6	343.297,3
3	Industri Pengolahan	673.607,2	744.065,6	817.686,2	906.868,9	996.946,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.740,1	9.139,5	9.027,8	9.306,1	10.308,9
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.138,7	11.478,7	11.720,2	12.270,8	13.063,1
6	Konstruksi	908.771,0	1.013.540,7	1.117.210,6	1.265.734,8	1.371.299,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.542.146,5	1.726.912,7	1.950.059,6	2.131.027,3	2.412.583,3
8	Transportasi dan Pergudangan	143.958,5	155.429,7	176.842,7	206.127,3	234.016,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253.629,0	287.186,8	323.573,6	375.613,4	431.033,8
10	Informasi dan Komunikasi	673.149,6	746.265,3	837.375,3	919.535,6	1.018.291,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270.310,6	320.215,6	374.791,5	425.121,6	476.378,5
12	Real Estate	240.787,7	261.724,6	295.393,3	313.824,3	364.378,5
13	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	42.729,0	46.848,4	52.449,8	57.308,8	63.698,6
14	Jasa Pendidikan dan Kesehatan dan Kegiatan Sosial	614.417,7	674.340,1	698.740,0	711.940,6	778.047,4
15	Jasa Pendidikan	764.638,5	892.805,5	1.013.937,5	1.133.289,9	1.259.677,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.146,4	85.239,9	95.928,1	110.083,0	128.359,1
17	Jasa Lainnya	215.072,7	221.287,6	234.198,4	260.274,5	291.287,4
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>9.960.335,3</b>	<b>11.047.556,0</b>	<b>12.153.617,7</b>	<b>13.393.595,3</b>	<b>14.912.841,6</b>

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

**Lampiran 3. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011 – 2015 (Ton)**

No	Jenis Ikan	Tahun / Ton									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi
1	ikan mas							8,5	2791,2	8,98	3711
2	ikan nila	620	50054	619,5	44869	104,55	11533,8	137,5	10237,7	133,06	7840,9
3	ikan gurami	92	11463	92,8	18087	92,2	17886,7	108	24538,7	145,57	5835,7
4	ikan patin					5	3484,5	9,45	5788	9	25168,9
5	ikan lele	2100	57926	2005	62807	2165	78980	1860	96073,2	1487,64	5404,5
6	ikan mujair									13,14	112705,90

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

#### Lampiran 4. Pendapatan PDRB Sektor Berdasar Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,250,217.1	3,574,033.2	3,854,652.9	4,235,529.8	4,720,174.6	19,634,607.60
Pertambangan dan Penggalian	271,874.7	277,042.1	290,020.2	319,738.6	343,297.3	1,501,972.90
Industri Pengolahan	673,607.2	744,065.6	817,686.2	906,868.9	996,946.6	4,139,174.50
Pengadaan Listrik dan Gas	8,740.1	9,139.5	9,027.8	9,306.1	10,308.9	46,522.40
Pengolahan Air, Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,138.7	11,478.7	11,720.2	12,270.8	13,063.1	59,671.50
Konstruksi	908,771.0	1,013,540.7	1,117,210.6	1,265,734.8	1,371,299.3	5,676,556.40
Perdagangan Besar dan Eceran, Bengkel	1,542,146.5	1,726,912.7	1,950,059.6	2,131,027.3	2,412,583.3	9,762,729.40
Transportasi dan Pergudangan	143,958.5	155,429.7	176,842.7	206,127.3	234,016.5	916,374.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,629.0	287,186.8	323,573.6	375,613.4	431,033.8	1,671,036.60
Informasi dan Komunikasi	673,149.6	746,265.3	837,375.3	919,535.6	1,018,291.5	4,194,617.30
Jasa Keuangan dan Asuransi	270,310.6	320,215.6	374,791.5	425,121.6	476,378.5	1,866,817.80
Real Estate	240,787.7	261,724.6	295,393.3	313,824.3	364,378.5	1,476,108.40
Jasa Perusahaan	42,729.0	46,848.4	52,449.8	57,308.8	63,698.6	263,034.60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	614,417.7	674,340.1	698,740.0	711,940.6	778,047.4	3,477,485.80
Jasa Pendidikan	764,638.5	892,805.5	1,013,937.5	1,133,289.9	1,259,677.2	5,064,348.60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	75,146.4	85,239.9	95,938.1	110,083.0	128,359.1	494,766.50
Jasa Lainnya	215,072.7	221,287.6	234,198.4	260,274.5	291,287.4	1,222,120.60
	<b>9960335.3</b>	<b>11,047,556.0</b>	<b>12,153,617.7</b>	<b>13,393,595.3</b>	<b>13,393,595.3</b>	59,948,699.60

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

**Lampiran 5. Pendapatan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Ponorogo, 2011 – 2015**

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,031,099.4	3,134,723.1	3,125,304.3	3,211,494.3	3,306,338.2	15,808,959.3
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,919,786.5	3,002,224.4	2,985,419.4	3,060,018.8	3,148,996.0	15,116,445.1
a. Tanaman pangan	1,734,941.9	1,781,899.8	1,752,101.9	1,801,310.1	1,853,570.9	8,923,824.6
b. Tanaman Hortikultura	501,578.4	509,074.3	511,136.9	525,037.9	549,820.9	2,596,648.4
c. Tanaman Perkebunan	193,022.6	201,760.7	205,079.1	212,837.7	215,562.7	1,028,262.8
d. Peternakan	455,396.8	472,463.4	478,276.5	479,778.0	488,026.0	2,373,940.7
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	34,846.9	37,026.2	38,825.0	41,055.1	42,015.6	193,768.8
2. Kehutanan dan Penebangan	64,028.0	81,045.0	83,572.8	92,974.7	96,637.9	418,258.4
3. Perikanan	47,284.8	51,453.7	56,312.1	58,500.9	60,704.3	274,255.8
<b>PDRB</b>	<b>9960335.3</b>	<b>11,047,556.0</b>	<b>12,153,617.7</b>	<b>13,393,595.3</b>	<b>13,393,595.3</b>	<b>59,948,699.6</b>

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo**

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,40	9,96	7,85	9,88	11,44	48,53	9,71
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,30	9,23	7,42	9,72	11,59	47,26	9,45
a. Tanaman pangan	8,03	10,55	6,43	8,66	12,33	46,00	9,20
b. Tanaman Hortikultura	11,31	1,92	5,52	12,19	5,69	36,63	7,33
c. Tanaman Perkebunan	11,88	10,88	7,53	12,19	5,69	48,17	9,63
d. Peternakan	11,38	11,38	12,77	9,60	9,12	54,25	10,85
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	5,57	9,33	11,53	12,66	9,69	48,78	9,76
2. Kehutanan dan Penebangan	15,37	36,30	18,93	14,39	8,10	93,09	18,62
3. Perikanan	7,62	20,00	15,27	11,03	9,04	62,96	12,59

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2016

